

TESIS

KECENDERUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH  
KE PENGGUNAAN LAIN DI KECAMATAN TURIKALE  
KABUPATEN MAROS

*THE TENDENCY OF WETLAND CONVERSION  
TO OTHER USES AT TURIKALE DISTRICT  
MAROS REGENCY*

UNIVERSITAS  
IKA KARTIKASARI  
MPW4510034

**BOSOWA**



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR

2012

TESIS

**KECENDERUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH  
KE PENGGUNAAN LAIN DI KECAMATAN TURIKALE  
KABUPATEN MAROS**

*THE TENDENCY OF WETLAND CONVERSION  
TO OTHER USES AT TURIKALE DISTRICT  
MAROS REGENCY*

IKA KARTIKASARI

MPW4510034

UNIVERSITAS  
**BOGOWA**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45"**

**MAKASSAR**

**2012**

**KECENDERUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH  
KE PENGGUNAAN LAIN DI KECAMATAN TURIKALE  
KABUPATEN MAROS**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota

**BOSOWA**

Disusun dan diajukan oleh

**IKA KARTIKASARI**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR  
2012**

# TESIS

## KECENDERUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH KE PENGGUNAAN LAIN DI KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

**IKA KARTIKASARI**

Nomor Pokok MPW 45 10 034

Telah dipertahankan di depan Panitia ujian Tesis  
pada tanggal 8 Agustus 2012  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

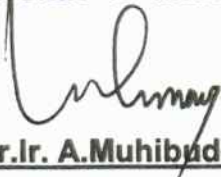


Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS



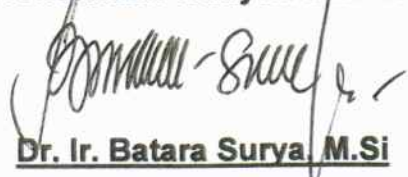
Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas 45 Makassar



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS

Ketua Program Studi  
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Ir. Batara Surya, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA KARTIKASARI

Nomor Mahasiswa : MPW 4510034

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis / ajukan benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi / sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2012

Yang Menyatakan,

**IKA KARTIKASARI**

## PRAKATA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari kegiatan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul "Kecenderungan Alih Fungsi Lahan Sawah ke Penggunaan Lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros", yang merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas 45 Makassar, Salawat dan salam juga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta pengikutnya.

Kendala-kendala dan permasalahan yang penulis hadapi baik mengenai literatur maupun pelaksanaan pengambilan data di lapangan dan menganalisis data, tentunya tidak dapat diatasi tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS, selaku Pembimbing sekaligus Direktur Program Pascasarjana 45, yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan konsultasi yang bersifat terbuka dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus sebagai Tim Penguji.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Tommy S.S.Eisenring, M.Si, selaku Tim Penguji, atas kritik dan sarannya guna perbaikan tesis ini.
4. Seluruh staf dan pengajar Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota atas bantuan dan kerjasamanya.
5. Rekan-rekan mahasiswa Program PWK Angk. 2010 khususnya "Tim Maros", atas bantuan dan kebersamaannya yang terbina selama ini.
6. Senior di Pascasarjana 45 serta rekan kerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Maros, Muh. Maudu, S.Hut, MSP, yang telah membantu penulis dalam penyediaan beberapa data yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
7. Ibunda Dra. Hj. Naimah Pasulle, M.Si dan Ayahanda Ir. H. Zainuddin Munawar, M.Si, Kakak dan adik serta keluarga lainnya yang senantiasa penuh harapan, doa, nasehat, saran segala pengorbanannya selama ini.
8. Kepada Suami tercinta, Ardiyansyah Abd. Rahim, SE atas segala pengertian, motivasi serta doa selama penulisan ini.
9. Yang terkasih dan terindah dalam hidup, Ananda Athaya Naura Afifah dan Muh. Nadhif Faeyza Dzikra, dengan tawa dan celotehnya terutama pengorbanan atas kebersamaan yang sementara waktu kadang tidak dapat terpenuhi.
10. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan penulis sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar tesis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin.



## ABSTRAK

IKA KARTIKASARI. *Kecenderungan Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*. (Dibimbing oleh Hazairin Subair dan A. Muhibuddin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan perubahan lahan sawah ke penggunaan lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas data dan informasi pada tabulasi data kemudian data tersebut disusun kembali dalam bentuk tabel dan peta. Pada metode kuantitatif, data yang diperoleh lalu dianalisis menggunakan analisis chi-kuadrat untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain. Data-data diperoleh dari hasil pembagian kuisisioner kepada responden, wawancara dengan pihak-pihak terkait, studi dokumen hasil-hasil penelitian sebelumnya dan data-data lain yang dianggap perlu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros cenderung untuk peruntukan rumah tinggal, area pemukiman, lahan perkantoran dan area perdagangan, dimana faktor dominan yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu faktor ekonomi berdasarkan hasil analisis Chi kuadrat.



## ABSTRACT

IKA KARTIKASARI. *The Tendency Of Wetland Conversion at Turikale District Maros Regency.* (Supervised by Hazairin Subair and A. Muhibuddin).

This study aims to identify trends in wetland change to other uses in the district of Maros regency Turikale and to analyze the dominant factors affecting the conversion of wetland to other uses in the district of Maros regency Turikale.

The used method in this research is descriptive method and quantitative methods. Descriptive methods to provide an explanation and interpretation of data and information on the tabulation of the data then the data is rearranged in the form of tables and maps. On quantitative methods, the data obtained and analyzed using chi-square analysis to determine the dominant factors affecting the conversion of wetland to other uses. The data obtained from the distribution of questionnaires to the respondents, interviews with stakeholders, the study documents from the results of previous studies and other data deemed necessary.

The results showed that the conversion of wetland in the district of Turikale in Maros regency tend to allotment of houses, residential areas, land offices and trade areas, where the dominant factor influencing the change was economic factors, based on Chi Square analysis.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	ii
<b>PRAKATA</b>	iii
<b>ABSTRAK</b>	vi
<b>ABSTRACT</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkembangan Perekonomian	6
B. Alih Fungsi Lahan	7
C. Konversi Lahan Pertanian	11
D. Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah	17
E. Dampak Konversi Lahan Sawah	22
F. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	25

	Halaman
G. Kajian Teori	27
H. Kerangka Pikir	36
I. Hipotesis Penelitian	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	45
F. Definisi Operasional	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
2. Alih Fungsi Lahan	55
3. Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah	61
B. Pembahasan	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

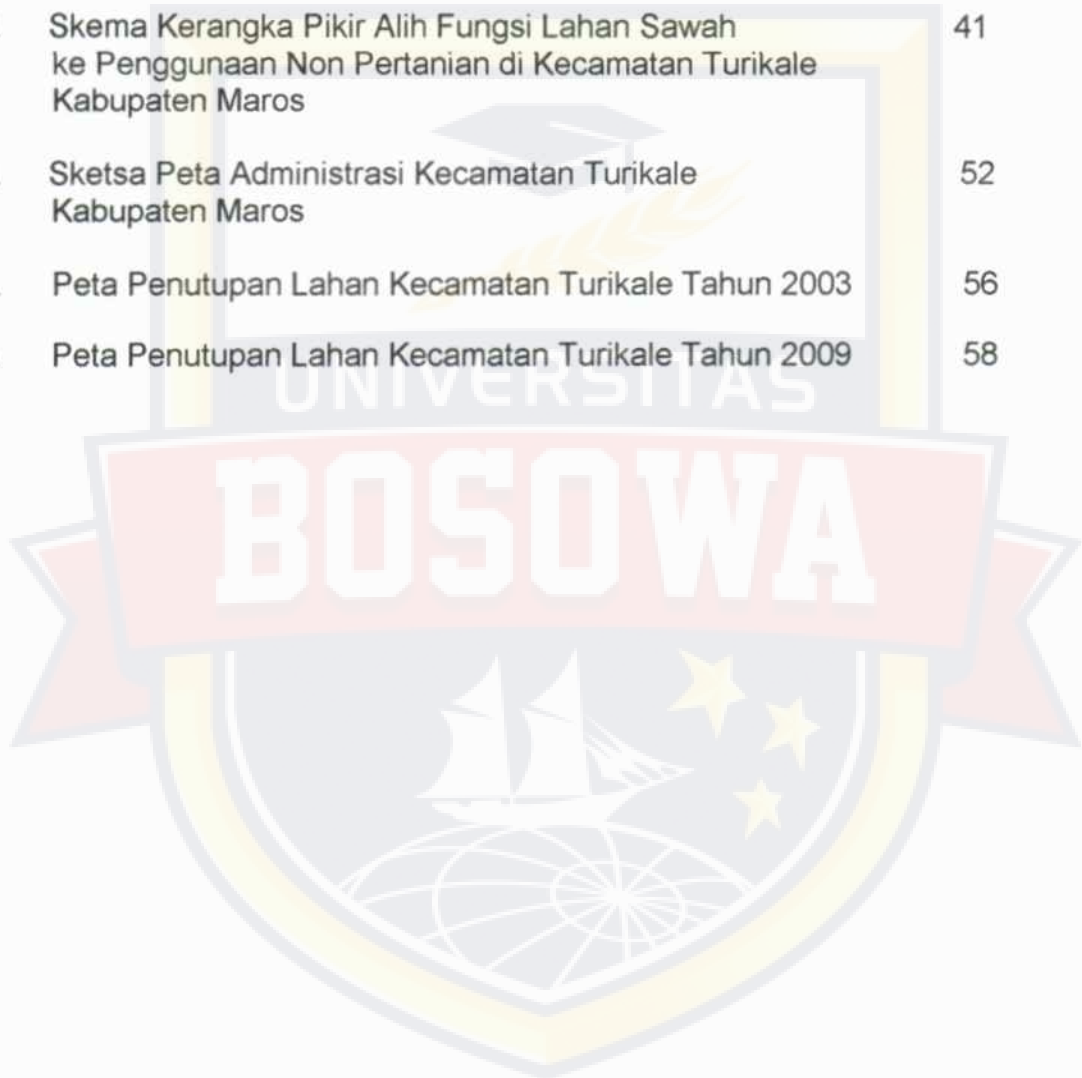
	Halaman
Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Sawah Menurut Kelurahan di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros	3
Tabel 2. Perbandingan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kec. Turikale Tahun 2005 dan 2010	53
Tabel 3. Perbandingan Komoditas Padi Sawah Tahun 2005 dan 2010 di Kecamatan Turikale Kab. Maros	54
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Industri Tahun 2005 dan 2010 di Kecamatan Turikale Kab. Maros	55
Tabel 5. Luas Lahan Pertanian Sawah Menurut Kelurahan di Kecamatan Turikale Kab. Maros Tahun 2005	57
Tabel 6. Luas Lahan Pertanian Sawah Menurut Kelurahan di Kecamatan Turikale Kab. Maros Tahun 2010	59
Tabel 7. Luas Perubahan Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Kab. Maros Tahun 2005-2010	60
Tabel 8. Jumlah Pemohon IMB dari Lahan Sawah Berdasarkan Fungsi Bangunan di Kec. Turikale Tahun 2005-2010	60
Tabel 9. Tingkat Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Turikale Tahun 2005	63
Tabel 10. Hubungan Faktor Kependudukan dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Tahun 2010	64
Tabel 11. Tingkat Pendapatan Masyarakat Per Bulan di Kecamatan Turikale Tahun 2010	65
Tabel 12. Hubungan Faktor Ekonomi dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Tahun 2010	65
Tabel 13. Tingkat Penjualan Lahan Sawah Ke Pihak Swasta di Kecamatan Turikale Tahun 2010	67
Tabel 14. Hub Faktor Investasi Pihak Swasta dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kec. Turikale Tahun 2010	67

	Halaman
Tabel 15. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Aturan Pemerintah di Kecamatan Turikale Tahun 2010	68
Tabel 16. Hubungan Faktor Intervensi Pemerintah Daerah dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Tahun 2010	69



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Diagram Cincin dan Perbedaan Kurva sewa Tanah Von Thunen	28
2. Skema Kerangka Pikir Alih Fungsi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros	41
3. Sketsa Peta Administrasi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros	52
4. Peta Penutupan Lahan Kecamatan Turikale Tahun 2003	56
5. Peta Penutupan Lahan Kecamatan Turikale Tahun 2009	58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Terkait dengan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia
- Lampiran 2. Daftar Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 3. Data Responden Penelitian
- Lampiran 4. Perhitungan Chi-Kuadrat Variabel Kependudukan dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale
- Lampiran 5. Perhitungan Chi-Kuadrat Variabel Ekonomi dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale
- Lampiran 6. Perhitungan Chi-Kuadrat Variabel Investasi Pihak Swasta dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale
- Lampiran 7. Perhitungan Chi-Kuadrat Variabel Intervensi Pemerintah Daerah dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Kab. Maros





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin membaik dan menuju ke arah struktur perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dengan non pertanian merupakan suatu proses perubahan struktur ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional dan kemampuan menyerap angkatan kerja yang semakin menurun diimbangi dengan proporsi kontribusi sektor non pertanian yang bertambah besar terhadap pendapatan nasional dan kemampuan menyerap angkatan kerja.

Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap output nasional dan kemampuannya menyerap angkatan kerja, memiliki kaitan dengan semakin besarnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa tingkat pendayagunaan lahan pertanian ke lahan non pertanian seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju.

Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan yang tinggi, selama ini terasa pada kota-kota besar yang merupakan kota-kota pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Seiring dengan semakin besarnya aktivitas perekonomian di suatu wilayah, akan menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap sumberdaya lahan. Ketersediaan lahan yang relatif tetap akan menyebabkan tingginya

kompetitif penggunaan lahan dalam berbagai alternatif penggunaannya seperti sektor industri, pemukiman, sektor perdagangan maupun sektor pertanian yang pada akhirnya penggunaan lahan akan di prioritaskan pada sektor non pertanian dengan nilai kompetitif yang paling besar.

Kabupaten Maros merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kemudahan aksesibilitas dan letak geografis yang strategis bersebelahan dengan wilayah pusat pertumbuhan Makassar yang sedang berkembang pesat, sehingga dalam pengembangannya Kabupaten Maros dipersiapkan sebagai pendukung dan penyeimbang dari kota Makassar. Kabupaten Maros sendiri menerima berbagai dampak pembangunan dari kota Makassar. Hal ini antara lain tercermin dalam meningkatnya permintaan penggunaan lahan untuk kegiatan pembangunan seperti pemukiman, perdagangan terutama di sekitar perbatasan Maros – Makassar yang lebih merupakan limpahan kegiatan dan kebutuhan perumahan penduduk kota Makassar daripada akibat perkembangan kegiatan atau peningkatan kebutuhan penduduk setempat.

Turikale adalah salah satu kecamatan yang merupakan pusat perekonomian Kabupaten Maros, dimana perkembangan perekonomian memberi dorongan yang kuat terhadap terjadinya perubahan penggunaan lahan di daerah ini sehingga dibutuhkan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung seperti lokasi untuk pemukiman, perkantoran, perdagangan, jaringan infrastruktur dan fasilitas lainnya.

Berikut adalah luas lahan sawah yang diusahakan untuk lahan pertanian menurut kelurahan di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros pada 5 (lima) tahun terakhir seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Sawah Menurut Kelurahan, di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros (Ha)

No.	Kelurahan	Jenis Sawah			
		Irigasi		Non Irigasi	
		2005	2010	2005	2010
1	Taroadada	-	-	141,87	125,53
2	Adatongeng	-	-	46,93	75,38
3	Pettuadae	-	39,06	94,35	82,06
4	Boribellayya	433,23	283,2	-	96,21
5	Raya	80,40	99	-	-
6	Turikale	83,97	83,01	-	-
7	Alliritengae	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>504,27</b>	<b>597,6</b>	<b>379,18</b>	<b>283,15</b>

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Maros

Berdasarkan Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa luas lahan dari tahun 2005 hingga 2010 untuk sawah irigasi mengalami peningkatan yaitu 93,33 Ha atau sebesar 18,5 %, namun mengalami penurunan sebesar 96,03 Ha atau 25,33 % untuk sawah non irigasi. Luas lahan tidak akan pernah bertambah luas akan tetapi permintaan terhadap tanah terus meningkat untuk sektor non pertanian. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah antara lain faktor kependudukan, keadaan ekonomi, investasi pihak swasta dan kebijakan Pemerintah Daerah. Proses konversi yang terjadi di Kab. Maros dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah lahan untuk pertanian dan berubahnya mata pencaharian penduduk yang biasanya bertani, sehingga untuk mengantisipasi perkembangan



Kabupaten Maros khususnya Kecamatan Turikale ke depan, maka diperlukan suatu kajian tentang kecenderungan alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain serta mencari tahu beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Kabupaten Maros memiliki perkembangan pembangunan cukup pesat dan merupakan daerah penyangga kegiatan ekonomi kota besar Makassar. Dinilai dari segi aksesibilitasnya yang strategis dengan daerah sekitar, Kabupaten Maros memiliki peluang yang cukup besar untuk pengembangan wilayah pertanian. Ditingkat petani, dampak perubahan lahan sawah dapat dilihat dari hilangnya kesempatan memperoleh produksi dan nilai produksi usaha tani padi sawah, peluang memperoleh pendapatan usaha tani yang hilang, dan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Dampak dari perubahan lahan sawah tidak hanya dirasakan oleh petani saja, namun secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap struktur perekonomian wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan perubahan lahan sawah yang terjadi di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros?
2. Faktor dominan apa yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kecenderungan perubahan lahan sawah di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
2. Menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sawah kepenggunaan lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros, dalam hal ini seperti Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros dan instansi-instansi terkait lainnya.
2. Penelitian ini bagi penulis sendiri berguna untuk melatih kemampuan analisis penulis terhadap suatu masalah di suatu daerah yang berhubungan dengan proses pergeseran struktur ekonomi yang berdampak terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan sawah khususnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain yang akan melakukan studi selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkembangan Perekonomian

Menurut Djojohadikusumo (1994), perkembangan perekonomian di suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya transformasi struktur ekonomi. Transformasi struktur ekonomi ditandai dengan terjadinya peralihan dan pergeseran dari kegiatan sektor primer (pertanian, pertambangan) ke sektor produksi sekunder (industri manufaktur, konstruksi) dan sektor tersier (jasa). Terdapat perbedaan tingkat produksi dan pada laju pertumbuhan diantara sektor-sektor yang bersangkutan. Dalam hubungan ini terjadi pergeseran diantara peranan masing-masing sektor dalam komposisi produk nasional. Transformasi struktur ekonomi juga dapat dilihat dari sudut pergeseran dalam kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian cenderung menurun sebagai persentase secara menyeluruh dan sebaliknya, jumlah tenaga kerja di sektor sekunder dan tersier meningkat baik secara absolut maupun sebagai persentase dari jumlah total angkatan kerja.

Menurut Putri (1995), mengenai transformasi struktur ekonomi dan pembangunan pertanian, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan mempercepat terjadinya proses transformasi struktur ekonomi dalam pembangunan ekonomi yaitu ; Lokasi, sarana dan prasarana, produktivitas sektor pertanian, investasi dan kebijakan pemerintah daerah.



## B. Alih Fungsi Lahan

Sebagai sumberdaya alam, lahan merupakan wadah dan faktor produksi strategis bagi kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Perubahan pola penggunaan lahan pada dasarnya bersifat dinamis mengikuti perkembangan penduduk dan pola pembangunan wilayah (Utomo, 1992).

Perkembangan sektor pertanian pada umumnya terjadi pada wilayah - wilayah yang berlahan subur. Pada wilayah-wilayah inilah berkembang pusat-pusat pemukiman penduduk sehingga menuntut pemerintah daerah setempat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan prasarana-prasarana di wilayah tersebut. Adanya pusat pemukiman penduduk, ketersediaan prasarana dan berdasarkan pertimbangan faktor-faktor lokasi, yaitu dekatnya lokasi dengan pemukiman sebagai sumber tenaga kerja, maka penggunaan lahan untuk penggunaan non pertanian seperti industri cenderung untuk berkembang di wilayah ini (Nuryati, 1995).

Menurut Kustiawan (1997), konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Secara umum kasus yang tercantum pada bagian sebelumnya menjelaskan hal yang serupa seperti pengubahan fungsi sawah menjadi kawasan pemukiman.

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.

Wibowo (1996) menambahkan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk (2006) secara nasional, luas lahan sawah kurang lebih 7,8 juta Ha, dimana 4,2 juta Ha berupa sawah irigasi dan sisanya 3,6 juta Ha berupa sawah nonirigasi. Selama Pelita VI tidak kurang dari 61.000 Ha lahan sawah telah berubah menjadi penggunaan lahan nonpertanian. Luas lahan sawah tersebut telah beralih fungsi menjadi perumahan (30%), industri (65%), dan sisanya (5%) beralih fungsi penggunaan tanah lain.

Penelitian yang dilakukan Irawan (2005) menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan di luar Jawa (132 ribu Ha per tahun) ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa (56 ribu ha per tahun). Sebesar 58,68 persen alih fungsi lahan sawah tersebut ditujukan untuk kegiatan nonpertanian dan sisanya untuk kegiatan bukan sawah. Alih fungsi lahan sebagian besar untuk kegiatan pembangunan perumahan dan sarana publik.

Winoto (2005) mengemukakan bahwa lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal itu disebabkan oleh :

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agro ekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan.
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering
4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

Fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah menjadi perhatian semua pihak. Penelitian yang dilakukan Winoto (2005) menunjukkan bahwa sekitar 187.720 Ha sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama di Pulau Jawa. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan total lahan sawah beririgasi seluas 7,3 juta Ha dan hanya sekitar 4,2 juta Ha (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya sedang sisanya sekitar 3,01 juta Ha (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.



### C. Konversi Lahan Pertanian

Lahan sawah dapat dianggap sebagai barang publik, karena selain memberikan manfaat yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga memberikan manfaat yang bersifat sosial. Lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana penumbuhan rasa kebersamaan (gotong royong), sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Manfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati (Rahmanto, dkk, 2002).

Perkembangan sektor pertanian pada umumnya terjadi pada wilayah yang berlahan subur. Pada wilayah-wilayah inilah berkembang pusat-pusat pemukiman penduduk sehingga menuntut pemerintah daerah setempat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan prasarana-prasarana di wilayah tersebut. Adanya pusat pemukiman penduduk, ketersediaan prasarana dan berdasarkan pertimbangan faktor-faktor lokasi, yaitu dekatnya lokasi dengan pemukiman sebagai sumber tenaga kerja, maka penggunaan lahan untuk penggunaan non pertanian seperti industri cenderung untuk berkembang di wilayah ini (Nuryati, 1995).

Menurut Utomo, dkk (1992), konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan fungsi lindung menjadi lahan pemukiman. Hal ini sejalan dengan penelitian di Desa Sintuwu dan Desa Berdikari dimana lahan yang dikonversi merupakan kawasan hutan lindung yang kemudian dijadikan kawasan pemukiman oleh mereka.

Disadur dari Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Direktorat Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, 2006 :

#### 1. Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain

Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralihfungsi tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi sangat tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan berlokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang pengembangan produksi padi telah maju.



## 2. Fungsi utama lahan sawah

Fungsi utama lahan sawah adalah untuk mendukung pengembangan produksi pangan khususnya padi. Namun justifikasi tentang perlunya pengendalian alih fungsi lahan sawah harus berbasis pada pemahaman bahwa lahan sawah mempunyai manfaat ganda (multi fungsi). Secara holistik, manfaat tersebut terdiri dari dua kategori: (1) nilai penggunaan (use values), dan (2) manfaat bawaan (non use values). Nilai penggunaan mencakup: (i) manfaat langsung, baik yang nilainya dapat diukur dengan harga (misalnya keluaran usahatani) maupun yang tidak dapat diukur dengan harga (misalnya tersedianya pangan, wahana rekreasi, penciptaan lapangan kerja), dan (ii) manfaat tidak langsung yang terkait dengan kontribusinya dalam pengendalian banjir, menurunkan laju erosi, dan sebagainya. Manfaat bawaan mencakup kontribusinya dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, sebagai wahana pendidikan, dan sebagainya. Pemahaman yang komprehensif terhadap multi fungsi lahan sawah sangat diperlukan agar kecenderungan "under valued" terhadap sumberdaya tersebut dapat dihindarkan.

## 3. Pola alih fungsi lahan sawah

Pola alih fungsi lahan sawah dapat dipilah menjadi dua: (1) sistematis, (2) sporadis. Alih fungsi lahan sawah untuk pembangunan kawasan industri, perkotaan, kawasan pemukiman (real estate), jalan raya, kompleks perkantoran, dan sebagainya mengakibatkan

terbentuknya pola alih fungsi yang sistematis. Lahan sawah yang beralihfungsi pada umumnya mencakup suatu hamparan yang cukup luas dan terkonsolidasi. Di sisi lain, alih fungsi lahan sawah yang dilakukan sendiri oleh pemilik lahan sawah umumnya bersifat sporadis. Luas lahan sawah yang terkonversi kecil-kecil dan terpencar.

Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah pada umumnya berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi (misalnya untuk pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya) atau untuk pemenuhan kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah, atau untuk lahan tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan). Proses alih fungsi lahan sawah cenderung berlangsung lambat jika motivasi untuk mengubah fungsi terkait dengan degradasi fungsi lahan sawah, misalnya akibat kerusakan jaringan irigasi sehingga lahan tersebut tidak dapat difungsikan lagi sebagai lahan sawah.

#### 4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Secara empiris, instrumen kebijakan yang selama ini menjadi andalan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah aturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan fakta empirik di lapangan, ada dua jenis proses konversi lahan sawah, yaitu konversi sawah yang langsung dilakukan oleh petani pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses penjualan. Sebagian besar konversi lahan sawah tidak dilakukan secara langsung oleh petani tetapi oleh pihak lain yaitu pembeli. Konversi yang dilakukan langsung oleh petani luasannya sangat kecil. Hampir 70 persen proses jual beli lahan sawah melibatkan pemerintah, yaitu ijin lokasi dan ijin pembebasan lahan.

Proses konversi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni, hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi asimetrik informasi diantara keduanya. Sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan *bargaining*. Sedangkan tipe yang kedua adalah konversi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai *planner* yang bertugas mengalokasikan

lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya.

Berdasarkan faktor-faktor penggerak utama konversi lahan, pelaku, pemanfaatan dan proses konversi, maka tipologi konversi terbagi menjadi tujuh tipologi, yaitu (Sihaloho, 2004):

- 1) Konversi gradual-berpola sporadik, pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama yaitu lahan yang tidak/kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan pelaku konversi.
- 2) Konversi sistematis berpola *enclave*, pola konversi yang mencakup wilayah dalam bentuk seahamparan tanah secara serentak dalam waktu yang relatif sama.
- 3) Konversi adaptif demografi, pola konversi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal/pemukiman akibat adanya pertumbuhan penduduk.
- 4) Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari kondisi lama untuk keluar dari sektor pertanian utama.
- 5) Konversi tanpa beban, pola konversi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas menjual tanah kepada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain.



- 6) Konversi adaptasi agraris, pola konversi yang terjadi karena keinginan untuk meningkatkan hasil pertanian dan membeli tanah baru ditempat tertentu.
- 7) Konversi multi bentuk atau tanpa pola, konversi yang diakibatkan berbagai faktor peruntukan seperti pembangunan perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, dan sebagainya.

#### **D. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah**

Menurut Iwan Isa (BPN 2004), faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain:

1. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, tempat rekreasi, dan sarana lainnya.
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antar lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian,

menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu, terdapat keberadaan "sawah kejepit" yakni sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena daerah sekitarnya sudah beralih menjadi perumahan atau kawasan industri, sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.

3. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya), seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya.
4. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.

5. Degradasi lingkungan, antara lain kemarau panjang yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama sawah; penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta pencemaran air irigasi; rusaknya lingkungan sawah sekitar pantai mengakibatkan terjadinya intrusi (penyusupan) air laut ke daratan yang berpotensi meracuni tanaman padi.
6. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan.
7. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (Law Enforcement) dari peraturan-peraturan yang ada.

Pasandaran (2006), menjelaskan paling tidak ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air,
2. Dinamika pembangunan,
3. Peningkatan jumlah penduduk.

Sihaloho (2004) menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab konversi lahan di Kelurahan Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat sebagai berikut:

1. Faktor penambahan penduduk yang begitu cepat berimplikasi kepada permintaan terhadap lahan pemukiman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
2. Faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan. Masyarakat pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya. Masyarakat pedesaan beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk kegiatan industri dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan. Di sisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga petani lebih memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan non-pertanian;
3. Faktor luar, yaitu pengaruh warga dari desa-kelurahan perbatasan yang telah lebih dahulu menjual tanah mereka kepada pihak Perseroan Terbatas (PT);
4. Adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan produktif milik warga;



5. Proses pengalihan pemillik lahan dari warga ke beberapa PT dan ke beberapa orang yang menguasai lahan dalam luasan yang lebih dari 10 hektar; dan
6. Intervensi pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurut Hayat (2002), faktor-faktor yang diduga mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat wilayah dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) dengan menggunakan pendekatan dua variabel, variabel tak bebas yaitu, penurunan jumlah luas lahan dan variabel bebas yaitu, kepadatan penduduk, produktivitas padi sawah, persentase luas lahan sawah, kontribusi sektor non pertanian, penambahan jalan aspal dan proporsi jumlah tenaga kerja sektor non pertanian. Namun dalam hasil penelitiannya, faktor tenaga kerja sektor non pertanian dihilangkan karena terdapat kontribusi positif yang kuat dengan faktor kontribusi sektor non pertanian. Dari hasil perhitungan, faktor produktivitas lahan sawah, persentase luas lahan sawah beririgasi teknis, kontribusi sektor non pertanian dan penambahan jalan aspal berpengaruh nyata, sedangkan kepadatan penduduk merupakan faktor yang tidak mempengaruhi secara nyata dalam model ini pada taraf uji 0,1.

Menurut Maulana (1999) dalam penelitiannya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Pantura Jawa Barat dengan menggunakan analisis regresi diduga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan sawah yaitu pertumbuhan penduduk, kontribusi PDRB non tanaman pangan, produktivitas lahan

sawah, jarak lokasi ke pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri. Melalui uji-t diperoleh bahwa pertumbuhan penduduk, kontribusi PDRB non tanaman pangan, jarak lokasi dari pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri berpengaruh nyata terhadap model, sedangkan produktivitas lahan sawah tidak berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99 persen.

#### **E. Dampak Konversi Lahan Sawah**

Menurut Nuryati (1995), masalah yang timbul akibat konversi lahan sawah ke penggunaan non sawah adalah terancamnya swasembada beras yang telah dicapai dengan susah payah. Di samping itu konversi lahan sawah ini mempunyai opportunity cost yang sangat besar, diantaranya adalah penurunan produksi pangan lokal atau nasional yang secara tidak langsung akan mengurangi kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, penurunan laju daya serap tenaga kerja sektor pertanian, mubazirnya investasi irigasi dan dampak konversi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Menurut Sumaryanto (1994), pengalihan fungsi lahan ke penggunaan lain, secara otomatis mengubah besaran maupun jenis manfaat yang dapat di terima dari penggunaan lahan tersebut. Kerugian akibat konversi lahan sawah terutama adalah hilangnya "peluang" memproduksi hasil pertanian di lahan sawah yang besarnya berbanding lurus dengan luas lahan yang terkonversi. Kerugiannya antara lain penurunan produksi pertanian dan nilainya, pendapatan usahatani,

kesempatan kerja pada kegiatan usahatani, kehilangan manfaat investasi dari lahan terkonversi.

Menurut Situmeang (1998), dalam penelitiannya mengenai pola hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan transformasi struktur ekonomi dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, menyatakan bahwa pergeseran struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk berpengaruh nyata dalam mendorong konsumsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti lahan perumahan, lahan industri dan lahan lain. Menurunnya produktivitas lahan, khususnya produktivitas lahan tanaman pangan non padi, sangat nyata dalam mempercepat konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pertumbuhan ekonomi dalam perkembangannya di tandai dengan terjadinya pergeseran tenaga kerja dan terjadinya pergeseran penggunaan lahan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Hal ini berdampak pada kontribusi masing-masing sektor yang bersangkutan terhadap output nasional dan dalam hal kemampuan menyerap angkatan kerja, dimana peran sektor pertanian akan semakin menurun dan pangsa sektor non pertanian akan semakin meningkat. Terjadinya pergeseran penggunaan lahan dari sektor pertanian ke penggunaan sektor non pertanian, memberikan dampak kerugian tidak hanya bagi para petani, namun juga memberi dampak pada perekonomian wilayah. Ditingkat wilayah, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya konversi lahan sawah yaitu laju pertumbuhan



penduduk, produktivitas padi sawah, persentase luas lahan sawah irigasi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, penambahan jalan aspal dan kebijakan pemerintah.

Peran sektor pertanian sebagai sektor primer, masih menjadi salah satu sektor yang dapat diunggulkan bagi perkembangan perekonomian wilayah. Hal ini mengingat ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang cukup berlimpah.

Sihaloho, (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan berimplikasi pada perubahan struktur agraria. Adapun perubahan yang terjadi, yaitu:

- 1) Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya prose marginalisasi.
- 2) Perubahan pola penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan



menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. Implikasi dari berlangsungnya perubahan ini adalah dimanfaatkannya lahan tanpa mengenal sistem “bera”, khususnya untuk tanah sawah.

- 3) Perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang makin terbatas menyebabkan mudarnya sistem bagi hasil tanah “maro” menjadi “mertelu”. Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.
- 4) Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
- 5) Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang makin menurun). Dalam tulisan ini juga dijelaskan terjadinya polarisasi.

#### **F. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Menurut Iwan Isa (BPN 2004), dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui

3 (tiga) strategi, yaitu :

## 1. Memperkecil peluang terjadinya konversi

Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan sawah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk dirubah. Dari sisi permintaan pengendalian sawah dapat ditempuh melalui:

- a. Mengembangkan pajak tanah yang progresif;
- b. Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non pertanian sehingga tidak ada tanah yang terlantar.
- c. Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya pembangunan rumah susun.

## 2. Mengendalikan Kegiatan Konservasi Lahan

- a. Membatasi konversi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
- b. Mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif.
- c. Membatasi luas lahan yang dikonversi di setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri.
- d. Menetapkan Kawasan Pangan Abadi yang tidak boleh dikonversi, dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat.

### 3. Instrumen Pengendalian Konservasi Lahan

Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah adalah melalui instrumen yuridis dan non yuridis, yaitu:

- a. Instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat (apabila memungkinkan setingkat undang-undang) dengan ketentuan sanksi yang memadai.
- b. Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat.
- c. Pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah mengendalikan konversi lahan pertanian terutama sawah.
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi.

## G. Kajian Teori

### *Teori Lokasi Land Rend Von Thunen*

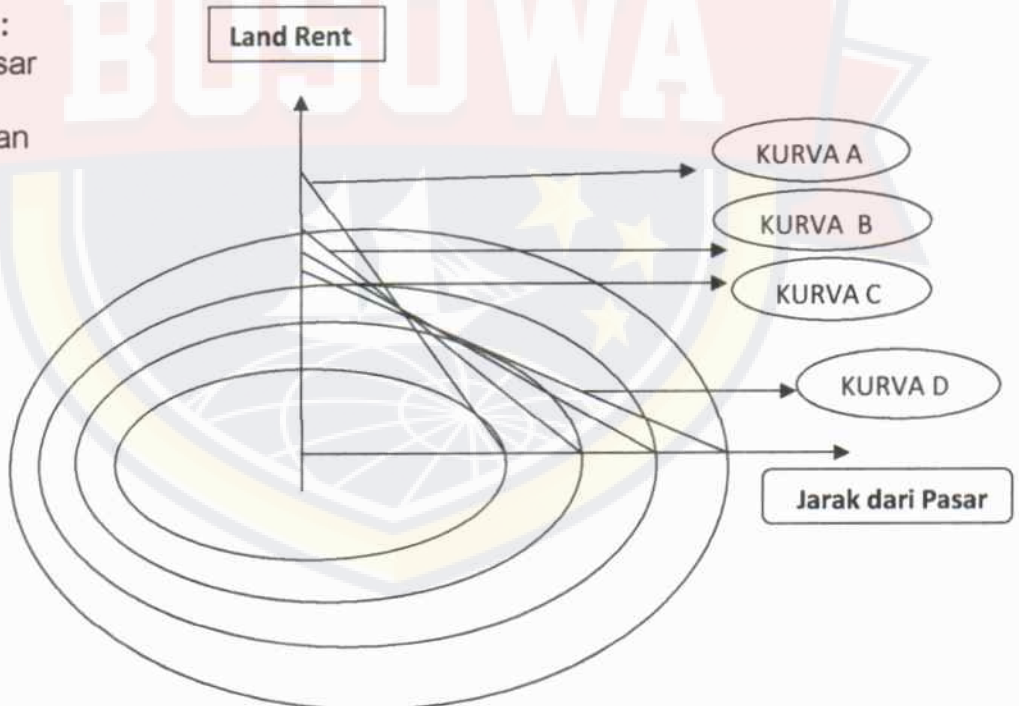
Mekanisme perubahan penggunaan lahan melibatkan kekuatan-kekuatan pasar, sistem administratif yang dikembangkan pemerintah, dan kepentingan politik. Pemerintah di sebagian besar negara di dunia pada kenyataannya memegang peran kunci dalam alokasi lahan seperti pajak, zonasi (zoning), maupun kebijakan langsung seperti kepemilikan lahan misalnya hutan, daerah lahan tambang, dan sebagainya (Prayudho, 2009).

Model klasik dari alokasi lahan adalah model Ricardo (Ricardian Rent). Menurut model ini, alokasi lahan akan mengarah pada penggunaan yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) yang lebih tinggi, yang tergantung pada derajat kualitas lahan yang ditentukan oleh

kesuburannya serta kelangkaan lahan. Menurut pendekatan von Thunen nilai land rent bukan hanya ditentukan oleh kesuburannya tetapi merupakan fungsi dari lokasinya. Pendekatan ini mengibaratkan pusat perekonomian adalah suatu kota yang dikelilingi oleh lahan yang kualitasnya homogen. Tata guna lahan yang dihasilkan dapat dipresentasikan sebagai cincin-cincin lingkaran yang bentuknya konsentris yang mengelilingi kota tersebut. Pendekatan von Thunen mencoba untuk menerangkan berbagai jenis pertanian dalam arti luas yang berkembang disekeliling daerah perkotaan yang merupakan pasar komoditi pertanian tersebut (Prayudho, 2009).

**Keterangan :**

- A : Pusat Pasar
- B : Industri
- C : Perumahan



*Sumber : Tarigan, 2006*

Gambar 1. Diagram cincin dan perbedaan kurva sewa tanah Von Thunen



Cincin A merepresentasikan aktivitas penggunaan lahan untuk jasa komersial (pusat kota). Land rent pada wilayah ini mencapai nilai tertinggi. Cincin-cincin B, C, dan D masing-masing merepresentasikan penggunaan lahan untuk industri, perumahan, dan pertanian. Meningkatnya land rent secara relatif akan meningkatkan nilai tukar (term of trade) jasa-jasa komersial sehingga menggeser kurva land rent A ke kanan dan sebagian dari area cincin B (kawasan industri) terkonversi menjadi A. Demikian seterusnya, sehingga konversi lahan pertanian (cincin D) ke peruntukan pemukiman (cincin C) juga terjadi. Dalam sistem pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas yang menghasilkan land rent lebih rendah ke aktivitas yang menghasilkan land rent lebih tinggi (Tarigan, 2006).

Alih fungsi lahan sawah tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan beberapa sektor ekonomi tumbuh dengan cepat sehingga sektor tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas. Lahan sawah yang terletak dekat dengan sumber ekonomi akan mengalami pergeseran penggunaan ke bentuk lain seperti pemukiman, industri manufaktur dan fasilitas infrastruktur. Hal ini terjadi karena land rent persatuan luas yang diperoleh dari aktivitas baru lebih tinggi daripada yang dihasilkan sawah (Prayudho, 2009).

Hubungan antara nilai land rent dan alokasi sumber daya lahan diantara berbagai kompetisi penggunaan sektor komersial dan strategis, mempunyai hubungan yang erat. Sektor tersebut berada pada kawasan strategis dengan land rent yang tinggi, sebaliknya sektor yang kurang mempunyai nilai komersial nilai rentnya semakin kecil. Economic rent sama dengan surplus ekonomi yang merupakan kelebihan nilai produksi total diatas biaya total. Suatu lahan sekurang-kurangnya memiliki empat jenis rent, yaitu:

1. Ricardian rent, menyangkut fungsi kualitas dan kelangkaan lahan.
2. Locational rent, menyangkut fungsi aksesibilitas lahan.
3. Ecological rent, menyangkut fungsi ekologi lahan.
4. Sociological rent, menyangkut fungsi sosial dari lahan.

Umumnya land rent yang mencerminkan mekanisme pasar hanya mencakup ricardian rent dan locational rent. Ecological rent dan sociological tidak sepenuhnya terjangkau mekanisme pasar (Prayudho, 2009).

Alih fungsi lahan sawah yang terjadi ditentukan juga oleh pertumbuhan sektor tanaman pangan, dalam hal ini mengenai nilai hasil sawah. Nilai inilah yang menjadi dasar individu mengalihfungsikan lahannya. Menurut teori oportunitas yang menjadi dasar asumsi Wiliamson bahwa oportunistik merupakan tindakan mengutamakan kepentingan diri dengan menggunakan akal untuk berusaha mengeksploitasi situasi demi keuntungan (Priyadi, 2009).

Hal tersebut sesuai dengan teori lokasi neo klasik yang menyatakan bahwa substitusi diantara berbagai penggunaan faktor produksi dimungkinkan agar dicapai keuntungan maksimum. Artinya alih fungsi lahan sawah terjadi akibat penggantian faktor produksi sedemikian rupa semata-mata untuk memperoleh keuntungan maksimum (Prayudho, 2009).

### ***Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole Theory)***

Konsep *Growth Pole* menurut Perroux: berdasarkan fakta dasar perkembangankeluangan (spasial), pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah; dan pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Namun, selain Perroux, terdapat beberapa orang lain yang berusaha untuk mendefinisikan apa itu *Growth Pole*, antara lain:

1. Boudeville (1966) mengenalkan tentang konsep kutub pertumbuhan regional, yakni sekelompok industri yg mengalami ekspansi yg berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruh daerah pengaruhnya.
2. McCrone (1969), menyebutkan tentang suatu pusat pertumbuhan yang terdiri dari suatu kompleks industri yang saling berkaitan dan mendapat keunggulan ekonomi dari keuntungan lokasi ( locational proximity ).

3. Nichols (1969), Growth Pole merupakan suatu pusat kegiatan ekonomi diperkotaan yang mengalami pertumbuhan secara self sustaining , dan sampaisuatu titik pertumbuhan itu didorong ke luar daerah pusat terutama ke daerah-daerah yang kurang berkembang.
4. Parr (1973), Growth Pole adalah suatu pusat pengembangan yang umumnya di representasikan dalam suatu pusat perkotaan dengan dimanavariabile pertumbuhan yang diukur berdasarkan pada ukuran populasi yang berupa pertumbuhan penduduk (kesempatan kerja) pada tingkat yg lebih besar dari rata-rata pertumbuhan regional.
5. Lasuen (1974) pusat pengembangan adalah sekelompok industri yg besar yang mempunyai keterkaitan yg kuat melalui hubungan input-output antara leading industry di sekitarnya yg secara geografi membentuk kluster.

Leading industry mendorong pertumbuhan ke seluruh kelompok, menginovasi, dan tumbuh pada tempat yg lebih cepat daripada industri-industri eksternal ke pusat. Gore, C (1974) berusaha untuk menyarikan beberapa inti pengertian Teori Growth Pole, antara lain

1. Suatu aglomerasi spasial dari industri yang saling berkaitan.
2. Suatu aglomerasi spasial dari industri yang saling berkaitan yang mengandung suatu pertumbuhan industri propulsive (industri yang bersifat mendorong)



3. Suatu aglomerasi spasial dari industri yang saling berkaitan, yang berlokasi di suatu pusat kota, yang melalui ekspansinya mendorong pertumbuhan pada daerah hinterland.
4. Suatu pusat perkotaan yang tumbuh yg mendorong pertumbuhan pada daerah hinterland.
5. Suatu pusat kota yang mengalami pertumbuhan.

#### Pendekatan Yang Digunakan Dalam Teori Pusat Pertumbuhan

Terdapat dua pendekatan di dalam Teori Growth Pole, antara lain secara fungsional suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang sifat hubungannya, memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara Geografis Suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik ( pole of attraction ) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah yang bersangkutan dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada. Menurut Ferroux, growth pole lebih menyangkut economic region daripada geographic region, yang didasarkan pada konsep sebagai berikut:

- a) Leading / Propulsive Industry, Pada kutub pertumbuhan, perusahaan-perusahaan pendorong yang besar yang termasuk leading industries mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Suatu leading industry mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Kaitan-kaitan antar industri yg kuat dg sektor-sektor lainnya. Kaitan ini dapat berbentuk kaitan ke

depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage).

2) Permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi, yang produknya biasanya dijual ke pasar-pasar nasional.

- b) Efek Polarisasi atau Backwash Effect Konsep dasar tentang efek polarisasi dan backwash effect sangat eratkaitannya dengan teori pusat pengembangan ini. Konsep ini menyatakan bahwa pertumbuhan dari leading industries (propulsive growth) akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya dari daerah hinterland ke kutub pertumbuhan. Dampak polarisasi bagi pusat pengembangan adalah adanya keuntungan aglomerasi, namun dapat menimbulkan polarisasi geografik dengan mengalirnya sumberdaya ke dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada pusat-pusat yang jumlahnya terbatas di suatu daerah.

Perroux sendiri dalam teorinya, secara singkat menyebutkan bahwa inti dari GrowthPole adalah 1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan dengan industri unggulan. 2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian karena akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah. 3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (unggulan) dengan industri yang relatif pasif atau industri

yang tergantung industri unggulan. Pusat pertumbuhan mempunyai empat ciri antara lain adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong sektor lain karena saling terkait. Kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan synergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

### ***Teori Lokasi Burges dan Homer Hoyt***

Burges menganalogikan pusat pasar dengan pusat kota (Control Business Distric atau CBD). CBD merupakan tempat yang lebih banyak digunakan untuk gedung kantor, pusat pertokoan, bank dan perhotelan. Asumsinya semakin jauh dari CBD nilai rent ekonomi kawasan tersebut semakin kecil, tetapi Burges menekankan pada factor jarak mutasi ketempat kerja dan tempat belanja merupakan factor utama dalam tata guna lahan diperkotaan.

Homer Hoyt mengemukakan gagasan pengganti konsentrasi kawasan berdasarkan kedudukan relatif tempat kerja dan belanja terhadap tempat pemukiman. Hasil analisis Hoyt adalah system jaringan transportasi seperti keadaan sebenarnya, Hoyt menyimpulkan bahwa jaringan transportasi tersebut mampu memberikan jangkauan yang lebih tinggi dan ongkos yang lebih murah terhadap kawasan lahan tertentu.



## H. Kerangka Pikir

### 1. Pertumbuhan dan Pergeseran Struktur Ekonomi

Proses pembangunan membawa konsekuensi berupa terjadinya suatu pergeseran struktural, dimana ada pergeseran peran sektor perekonomian utama dari sektor tradisional (pertanian) menjadi didominasi oleh peran sektor yang lebih modern (industri). Kondisi ini dapat terlihat melalui kontribusi sektor pertanian terhadap struktur produksi (Output) agregat yang semakin menurun, sedangkan disisi lain kontribusi sektor non pertanian, terutama sektor industri semakin meningkat ( Tyadi 1995).

Proses pergeseran struktur ekonomi di tandai dengan perubahan yang tidak sedikit pada struktur ekonomi suatu negara maupun daerah. Proses transformasi struktur ekonomi di tandai dengan semakin menurunnya Indeks Produktivitas Relatif (IPR)<sup>2</sup> sektor pertanian di Indonesia (Putri, 1995)

Menurut Sukirno (1985), perubahan persentasi sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi akibat perubahan struktur ekonomi :

1. Produksi sektor pertanian mengalami perkembangan yang lebih lambat dari perkembangan produksi nasional
2. Tingkat pertambahan produksi sektor industri adalah lebih cepat daripada tingkat pertambahan produksi nasional
3. Tidak adanya perubahan dalam peranan sektor jasa-jasa adalah sama dengan tingkat perkembangan produksi nasional.



Dalam menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan biasanya dilihat dari keadaan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya indikator struktur ekonomi dan peranan sektor-sektor ekonomi digunakan untuk melihat pergeseran-pergeseran antar sektor dalam struktur PDRB. Dengan mengetahui pergeseran-pergeseran tersebut dapat di indikasikan sektor-sektor dominan yang mungkin dapat dijadikan sektor kunci (key sektor) dan diharapkan mampu memberikan pengaruh pada sektor lain dan kegiatan ekonomi lebih lanjut (Nasoetion, 1998).

## 2. Konversi Lahan

Menurut Pakpahan seperti dikutip oleh Nuryati (1995), faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat wilayah yaitu faktor yang tidak langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan konversi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani yaitu faktor yang langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan konversi.

Di tingkat wilayah, menurut Pakpahan konversi lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi oleh : (1) Perubahan struktur ekonomi, (2) Pertumbuhan penduduk, (3) Arus urbanisasi, (4) Konsistensi implementasi rencana tata ruang.

Secara langsung konversi lahan sawah dipengaruhi oleh :

(1) Pertumbuhan pembangunan sarana transportasi (2) Pertumbuhan lahan untuk industri, (3) Pertumbuhan sarana pemukiman (4) Sebaran lahan sawah. Pengaruh langsung dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung, seperti pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta peningkatan arus urbanisasi akan meningkatkan tekanan penduduk atas lahan di pinggiran kota.

Secara umum, konversi lahan sawah ke penggunaan lain dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Konversi lahan sawah secara langsung umumnya terjadi sebagai akibat dari keputusan pemilik lahan sawah untuk mengalihkan lahan tersebut ke jenis pemanfaatan lain, diantaranya dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, arus urbanisasi dan konsistensi implementasi rencana tata ruang, sedangkan konversi lahan secara tidak langsung terjadi sebagai akibat makin menurunnya kualitas lahan sawah ataupun makin rendahnya income opportunity dari lahan tersebut secara relatif, diantaranya dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan pertanian.

### 3. Dampak Konversi lahan Sawah

Arah perkembangan perekonomian ke sektor industri, perdagangan dan jasa akan memberikan dorongan yang kuat terhadap terjadinya perubahan penggunaan lahan. Pemerintah membutuhkan lahan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung arah kebijaksanaanya seperti lokasi untuk industri, perdagangan, pergudangan, jaringan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap lahan, namun disisi lain ketersediaan lahan terutama di perkotaan sangat terbatas, akibatnya akan terjadi pemekaran kota (gentrifikasi kota), sehingga akan menyebabkan konversi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran dari lahan pertanian ke penggunaan non pertanian sebagai dampak dari semakin tingginya kompetisi dalam penggunaan lahan, menyebabkan ketersediaan lahan bagi penggunaan sektor pertanian dan sebagai lapangan usaha bagi petani akan semakin sempit. Dampak lebih lanjut dari perubahan penggunaan lahan ini, yaitu akan semakin besarnya mobilitas tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian dan semakin menurunnya luas lahan pertanian yang akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas sektor pertanian. Kedua hal ini dapat dilihat dengan semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan kemampuannya menyerap angkatan kerja.

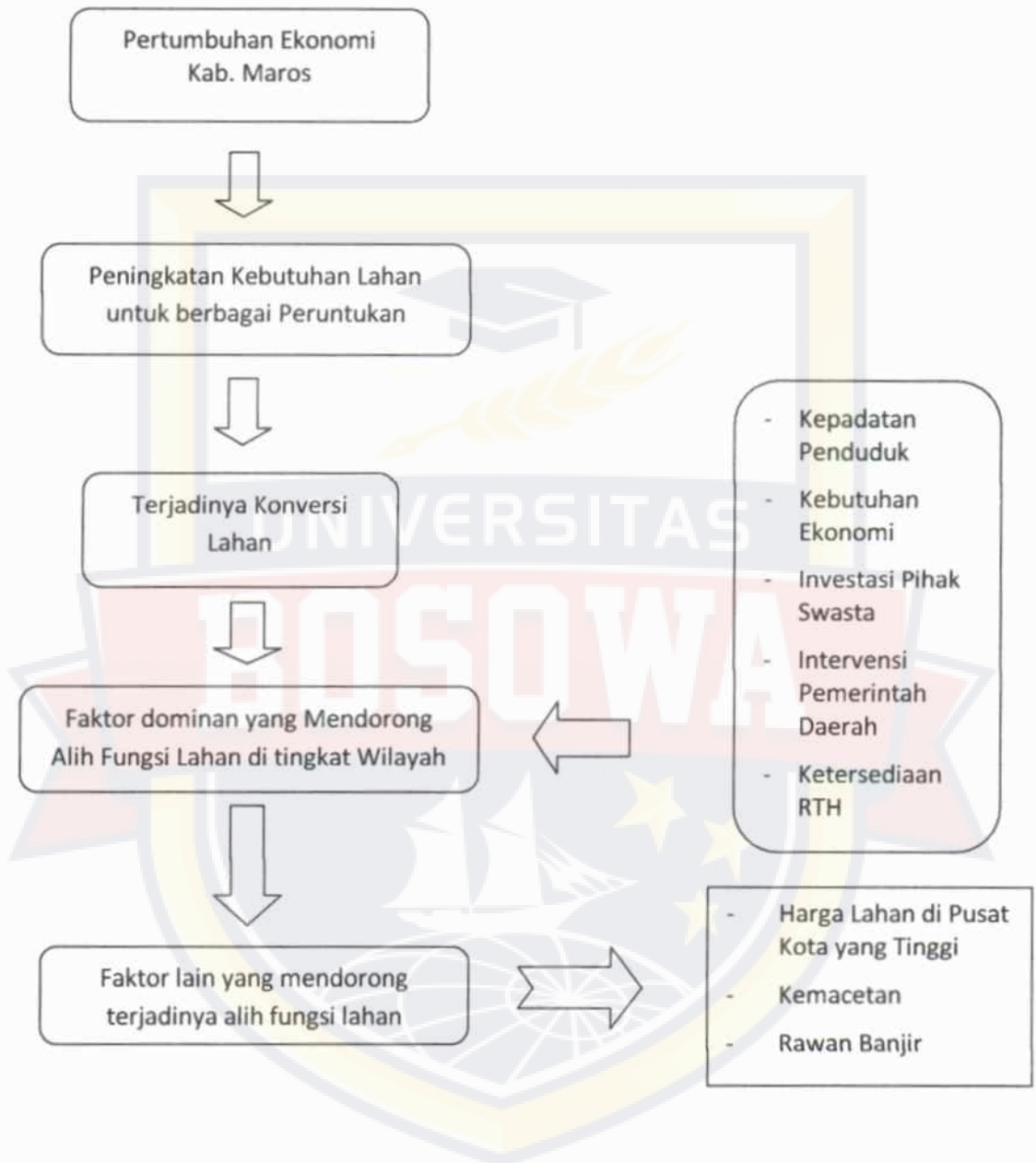


Semakin kecilnya luas lahan pertanian khususnya lahan sawah akan memberikan dampak kerugian, yaitu hilangnya jumlah produksi dan nilai produksi padi, hilangnya pendapatan usahatani padi dan hilangnya investasi irigasi. Derita kerugian ini tidak hanya berdampak pada petani saja namun akan berdampak pula terhadap perekonomian wilayah. Penurunan peran sektor pertanian yang diimbangi dengan laju pertumbuhan sektor lainnya terutama sektor industri dan bangunan akibat terjadi konversi lahan, ternyata juga memberi manfaat yaitu berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari tingginya pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini dikarenakan pajak lahan yang digunakan untuk perumahan dan industri memberikan nilai pajak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pajak lahan penggunaan lahan sawah.

Terjadinya perubahan peran masing-masing sektor ekonomi, dimana telah terjadinya penurunan peran sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan dan galian) dan meningkatnya peran sektor sekunder (sektor industri, sektor listrik dan sektor bangunan) dan sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa) terhadap output nasional dan kemampuannya menyerap angkatan kerja, akan berdampak terhadap struktur perekonomian wilayah. Hal ini dapat dilihat dengan dua indikator yaitu :

- (1) Kontribusi yang diberikan tiap sektor ekonomi terhadap PDRB
- (2) Kemampuan tiap sektor ekonomi dalam menyerap angkatan kerja.



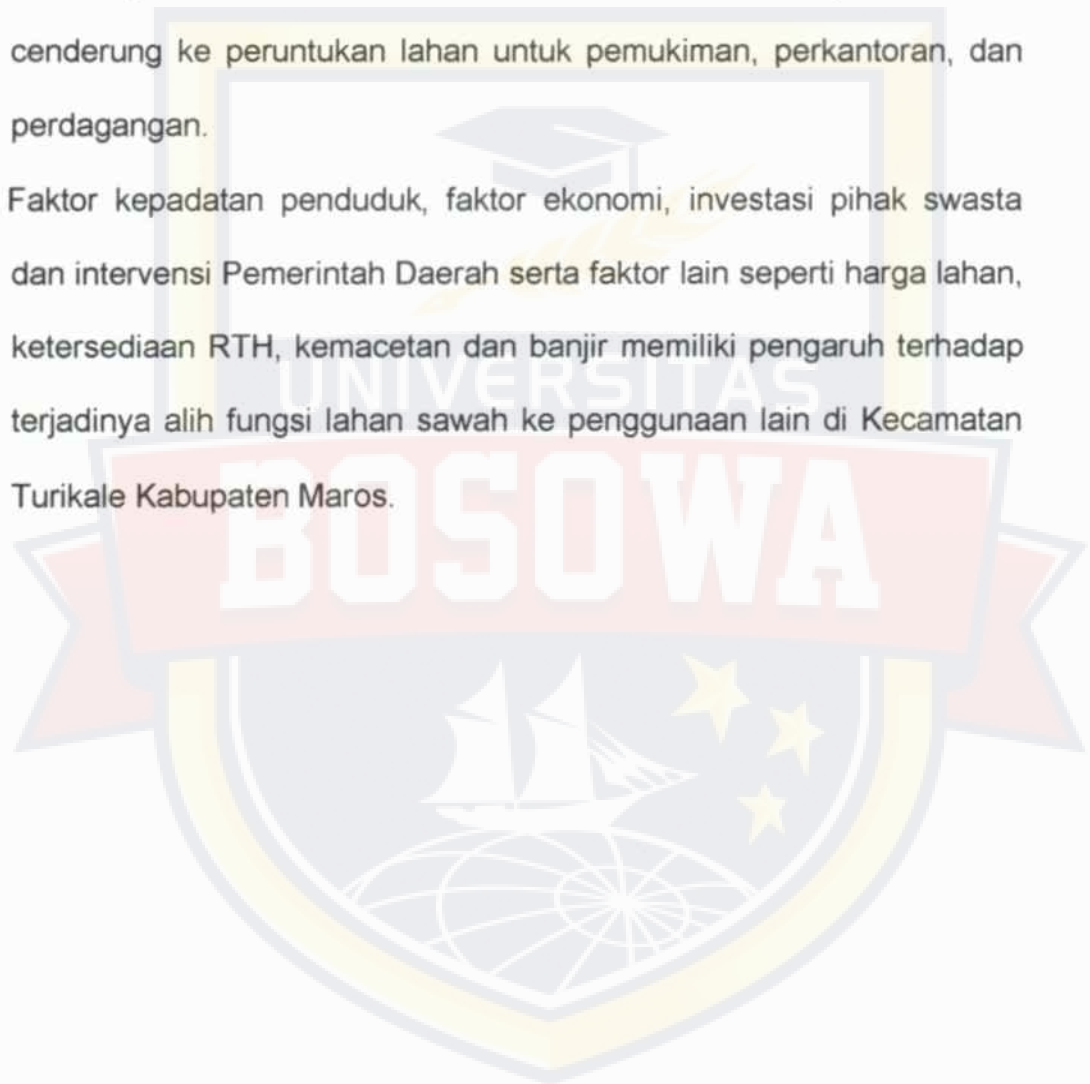


Gambar 2. Skema Kerangka Pikir

## I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale kabupaten Maros cenderung ke peruntukan lahan untuk pemukiman, perkantoran, dan perdagangan.
2. Faktor kepadatan penduduk, faktor ekonomi, investasi pihak swasta dan intervensi Pemerintah Daerah serta faktor lain seperti harga lahan, ketersediaan RTH, kemacetan dan banjir memiliki pengaruh terhadap terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian berlangsung dari April hingga Juni 2012, dan dilaksanakan di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.

#### B. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam alih fungsi lahan sawah ke non pertanian.
- b. Sampel dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat atau pemilik lahan sawah yang pernah menjual lahan sawahnya ke penggunaan lain dan tetap tinggal di sekitar lokasi pembangunan, dan masyarakat kota Makassar yang membeli lahan dan bertempat tinggal di lahan ex sawah, selanjutnya disebut sebagai responden.
- c. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dilakukan secara purposif, yaitu memilih sampel yang dapat mewakili populasi disesuaikan dengan kebutuhan data dalam penelitian, yang ciri dan keberadaannya dianggap mampu menggambarkan karakteristik / profil keberadaan populasi sebenarnya. Pemilihan lokasi penelitian dan calon responden dilakukan dengan cara bertahap dan bertingkat. Pada tahap

awal dikumpulkan data sekunder mengenai populasi konversi lahan sawah ke penggunaan lain di tingkat kecamatan. Pada tahap kedua dilakukan pemilihan contoh kelurahan, yaitu yang termasuk paling banyak terjadi alih fungsi lahan sawah. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemilihan respoiden utama secara purposive, yaitu yang oleh aparat kelurahan diketahui lahan sawahnya telah dijual atau dialihfungsikan ke penggunaan lain dan masih tetap tinggal di atau dekat lokasi awal. Dalam hal ini dipilih 23 sampel responden dari 4 kelurahan yang memiliki lahan sawah terkonversi, yaitu Kelurahan Taroda, Adatongeng, Pettuadae, dan Boribellaya.

### C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti responden utama / pemilik lahan, aparat desa setempat, maupun dari developer tertentu yang dapat ditemui pada saat pengumpulan data. Wawancara kepada petani menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperlukan untuk melihat terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian di tingkat wilayah adalah data *time series* yang meliputi data kependudukan, data perkembangan luas lahan sawah, produktivitas padi sawah,



kontribusi sektor non pertanian, serta data-data lainnya. Data yang dibutuhkan diperoleh antara lain dari Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Bappeda Kabupaten Maros, Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Maros, Dinas Tata Ruang Wilayah dan dinas atau instansi pemerintah maupun non pemerintah yang terkait lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka ada beberapa metode yang digunakan, yaitu :

1. Kuisioner, yaitu menyebarkan kuisioner (daftar pertanyaan terstruktur) kepada pihak yang menjadi responden penelitian.
2. Wawancara, yaitu berdiskusi langsung dengan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan materi penelitian ini.
3. Observasi atau pengamatan langsung, yaitu mengamati secara langsung kondisi di lokasi penelitian.
4. Studi dokumen, yaitu mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas data dan informasi pada tabulasi data. Sedangkan

penggunaan metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian di tingkat wilayah dan mengidentifikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Maros.

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menampilkan informasi berdasarkan data pada peta penutupan lahan beberapa tahun terakhir. Data yang diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penulisan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi data. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama pengamatan.
- b. Membandingkan peta penutupan lahan 5 tahun terakhir dengan peta setahun terakhir, kemudian menyusun kembali data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel untuk menghindari kesimpangsiuran interpretasi serta sekaligus untuk mempermudah interpretasi data.
- c. Menghubungkan hasil penelitian yang diperoleh dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, dengan tujuan mencari arti atau memberi interpretasi yang lebih luas dari data yang diperoleh.

Dengan menggunakan analisis deskriptif ini akan diperoleh gambaran umum mengenai pergeseran struktur ekonomi, perubahan peran sektoral dalam perekonomian daerah dan pertumbuhan sektoral. Sedangkan untuk alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain akan diperoleh gambaran umum mengenai perkembangan dan pola alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Maros.

## 2. Analisis Kuantitatif

Kuantitatif yaitu menggunakan pendekatan matematis untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain di Kabupaten Maros.

Untuk mengetahui hubungan variabel faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh yang nyata terhadap terjadinya alih fungsi lahan sawah dapat dilakukan dengan menggunakan Analisis *Chi-Kuadrat* ( $X^2$ ).

$$X^2 = \frac{(f_o - f_h)^2}{(f_h)}$$

Dimana :

$X^2$  = Hasil Chi-Kuadrat yang dihitung

$f_o$  = Frekuensi yang diperoleh

$f_h$  = Frekuensi yang diharapkan

Untuk menghitung frekuensi yang diharapkan, menggunakan rumus :

$$f_h = \frac{(n_{io} \times n_{oj})}{N}$$

Dimana :

$f_h$  = Frekuensi yang diharapkan

$n_{io}$  = Jumlah baris

$n_{oj}$  = Jumlah kolom

$N$  = Jumlah sampel (Sugiyono, 1998)

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila keadaan berikut tercapai yakni :  $X^2$  hitung  $<$   $X^2$  tabel yang berarti  $H_0$  diterima, sebaliknya apabila  $X^2$  hitung  $>$   $X^2$  tabel berarti  $H_0$  ditolak atau diterima  $H_1$ .

Untuk mengetahui besarnya hubungan variabel X dengan Y digunakan Uji Koefisien Kontingensi, yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C_{\max} = \sqrt{\frac{m - 1}{m}}$$

Dimana :

$C$  = Hasil Koefisien Kontingensi

$X^2$  = Hasil Chi Kuadrat yang dihitung

$N$  = Jumlah sampel

$m$  = Jumlah minimum antara baris atau kolom

Patokan interpretase nilai persentase oleh Sugiyono (1998) :

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,0 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat



## F. Definisi Operasional

1. Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non pertanian (Ha) yaitu seluruh sawah yang dikonversi kepenggunaan non pertanian dan diukur dalam satuan hektar.
2. Lahan Pertanian yaitu lahan yang dikuasai dan diusahakan untuk produksi pertanian.
3. Lahan non pertanian, yaitu lahan yang diusahakan untuk peruntukan selain bidang pertanian.
4. Lahan Sawah yaitu lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (gelengan), saluran untuk menahan / menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah.
5. Lahan Sawah irigasi  
Lahan sawah yang mendapatkan air dari sistem irigasi dan jaringannya dikelola oleh instansi pemerintah.
6. Lahan sawah non irigasi
  - a. Sawah tadah hujan adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.
  - b. Sawah pasang surut adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
  - c. Sawah lainnya adalah lahan sawah lebak, polder, lahan rawa yang di tanami padi dan lain-lain.

7. Kontribusi Sektor Non Pertanian (%)

Kontribusi sektor non pertanian dalam PDRB yang diperoleh dari jumlah keseluruhan PDRB Kabupaten Maros dikurangi kontribusi sektor pertanian.

8. Produktivitas Lahan (ton/ha)

Besarnya nilai produktivitas lahan secara langsung yang menunjukkan pendapatan kotor petani dari suatu lahan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Keadaan geografi Kecamatan Turikale merupakan daerah yang sebagian besar berbentuk dataran, yang secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Taroadi, Kelurahan Adatongeng, Kelurahan Pettuadai, Kelurahan Boribellaya, Kelurahan Raya, Kelurahan Turikale, dan Kelurahan Alliritengae. Dari tujuh daerah wilayah administrasi yang ada, mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0 – 20 meter di atas permukaan laut.

Luas Kecamatan Turikale sekitar 29,93 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Lau

Timur : Kecamatan Bantimurung dan Simbang

Selatan : Kecamatan Mandai

Barat : Kecamatan Maros Baru

Sketsa peta administrasi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2010

Gambar 3. Sketsa Peta Administrasi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros



## b. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Turikale Tahun 2010 sebanyak 41.319 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 19.964 jiwa dan perempuan sebanyak 21.355 jiwa yang tersebar di tujuh kelurahan. Rasio jenis kelamin (Sex Ratio) sekitar 93, hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang perempuan terdapat 93 laki-laki. Jumlah penduduk tertinggi berada pada Kelurahan Taroadada sebanyak 8.765 jiwa dan terendah sebanyak 4.007 jiwa berada pada Kelurahan Raya. Dengan total rumah tangga 8.651 dan rata-rata kepadatan penduduk kecamatan sebesar 1.381 jiwa/km<sup>2</sup>, mayoritas warganya berasal dari Suku/Etnis Bugis-Makassar.

Perbandingan jumlah dan kepadatan penduduk Kecamatan Turikale Kabupaten Maros antara tahun 2005 dan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2. berikut :

Tabel 2. Jumlah & Kepadatan Penduduk Kec. Turikale Kab. Maros

NO.	KELURAHAN	TAHUN 2005		TAHUN 2010	
		Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Taroadada	6.367	902	8.765	1.242
2	Adatongeng	6.227	2.015	6.552	2.120
3	Pettuadae	4.704	1.005	7.261	1.551
4	Boribellaya	3.889	452	4.215	490
5	Raya	3.430	1.665	4.007	1.945
6	Turikale	4.664	1.721	5.811	2.144
7	Alliritengae	5.691	3.290	4.768	2.721
<b>JUMLAH</b>		<b>34.972</b>	<b>11.050</b>	<b>41.379</b>	<b>12.213</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros

### c. Pertanian

Di Kecamatan Turikale, masyarakatnya tidak lagi mendominasi pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Turikale tahun 2010 yaitu seluas 883,45 Ha berupa lahan sawah, 442 Ha berupa tambak, kolam dan lahan pertanian non sawah lainnya. Sedangkan 1669 Ha merupakan lahan non pertanian berupa perumahan, industri, pertokoan dan lain sebagainya.

Semakin menurunnya sektor pertanian terutama pada komoditi padi sawah dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbandingan komoditas Padi Sawah Tahun 2005 dan 2010 di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

NO.	KOMODITAS PADI	TAHUN	
		2005	2010
1	Luas Panen (Ha)	1.690	883,45
2	Produksi (Ton)	8.788	5.230,24
3	Produktivitas (Kwt/Ha)	-	59,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros

### d. Industri

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jumlah industri kecil dan menengah di Kecamatan Turikale pada tahun 2010 terdiri dari 208 unit usaha formal dan 186 usaha non formal. Unit usaha formal mencakup 162 unit usaha perseorangan, 26 unit Usaha Dagang (UD),

6 unit Perseroan Terbatas (PT) dan 14 unit Perusahaan Komanditer (CV), seperti yang dapat dilihat dari tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Industri Tahun 2005 dan 2010 di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

NO.	KELURAHAN	JUMLAH INDUSTRI	
		2005	2010
1	Taroadaa	48	90
2	Adatongeng	31	16
3	Pettuadae	5	18
4	Boribellaya	4	0
5	Raya	1	0
6	Turikale	1	0
7	Alliritengae	2	62
<b>JUMLAH</b>		<b>92</b>	<b>186</b>

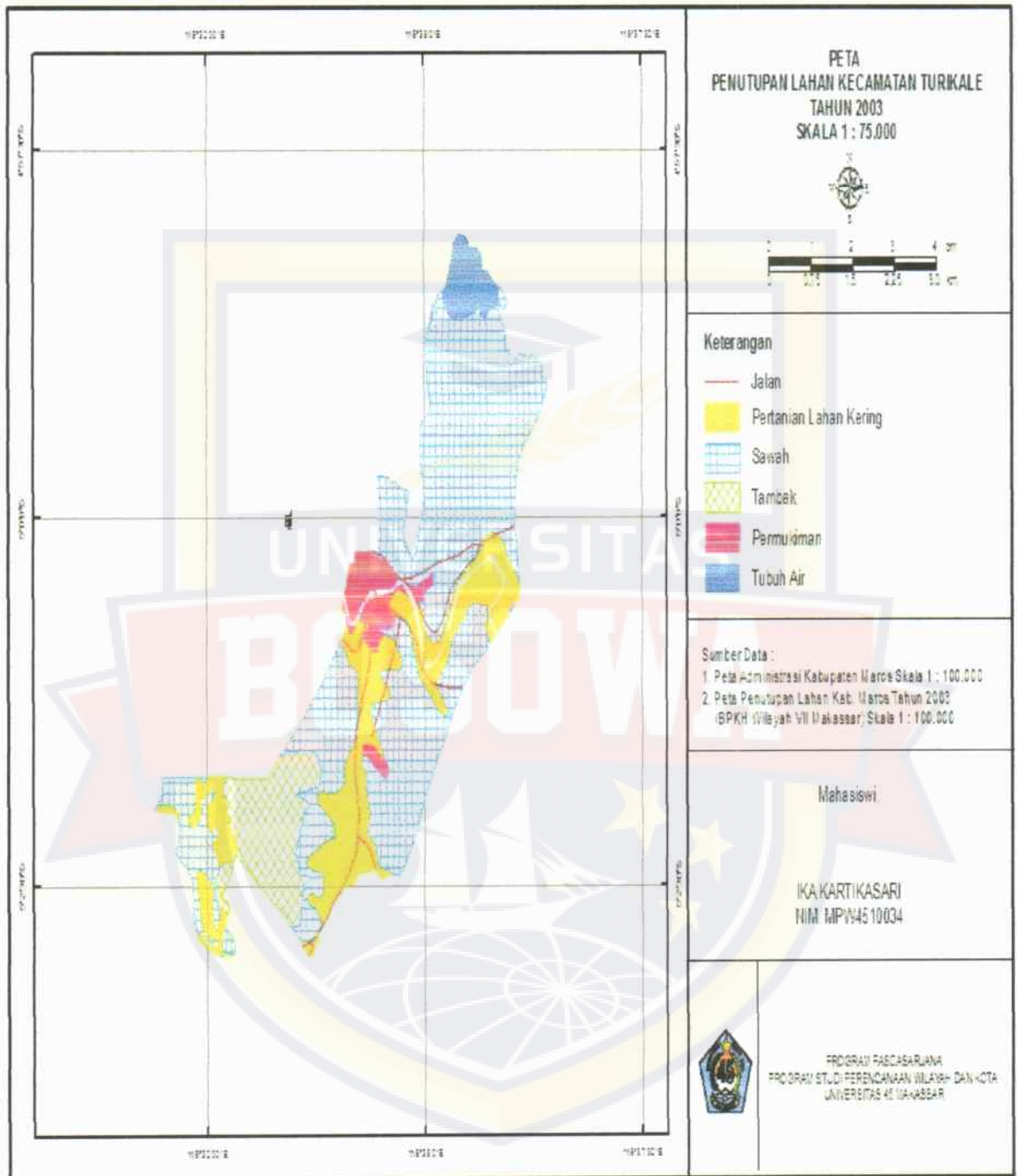
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros

## 2. Alih Fungsi Lahan Sawah

### a. Luas Lahan Sawah Tahun 2005

Luas lahan sawah di Kecamatan Turikale pada tahun 2005 sebesar 883,45 Ha atau 29,51 % dari luas wilayah kecamatan ini, yang terbagi atas sawah irigasi seluas 504,27 Ha dan sawah non irigasi seluas 379,18 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian luas lahan sawah di tiap kelurahan di Kecamatan Turikale pada tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 5, sedangkan peta penutupan lahan Kecamatan Turikale pada tahun 2003 diperlihatkan pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Peta Penutupan Lahan Kecamatan Turikale Tahun 2003



Sumber : Peta Administrasi Kabupaten Maros, 2003



Tabel 5. Luas Lahan Pertanian Sawah Menurut Kelurahan, di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros (Ha) Tahun 2005.

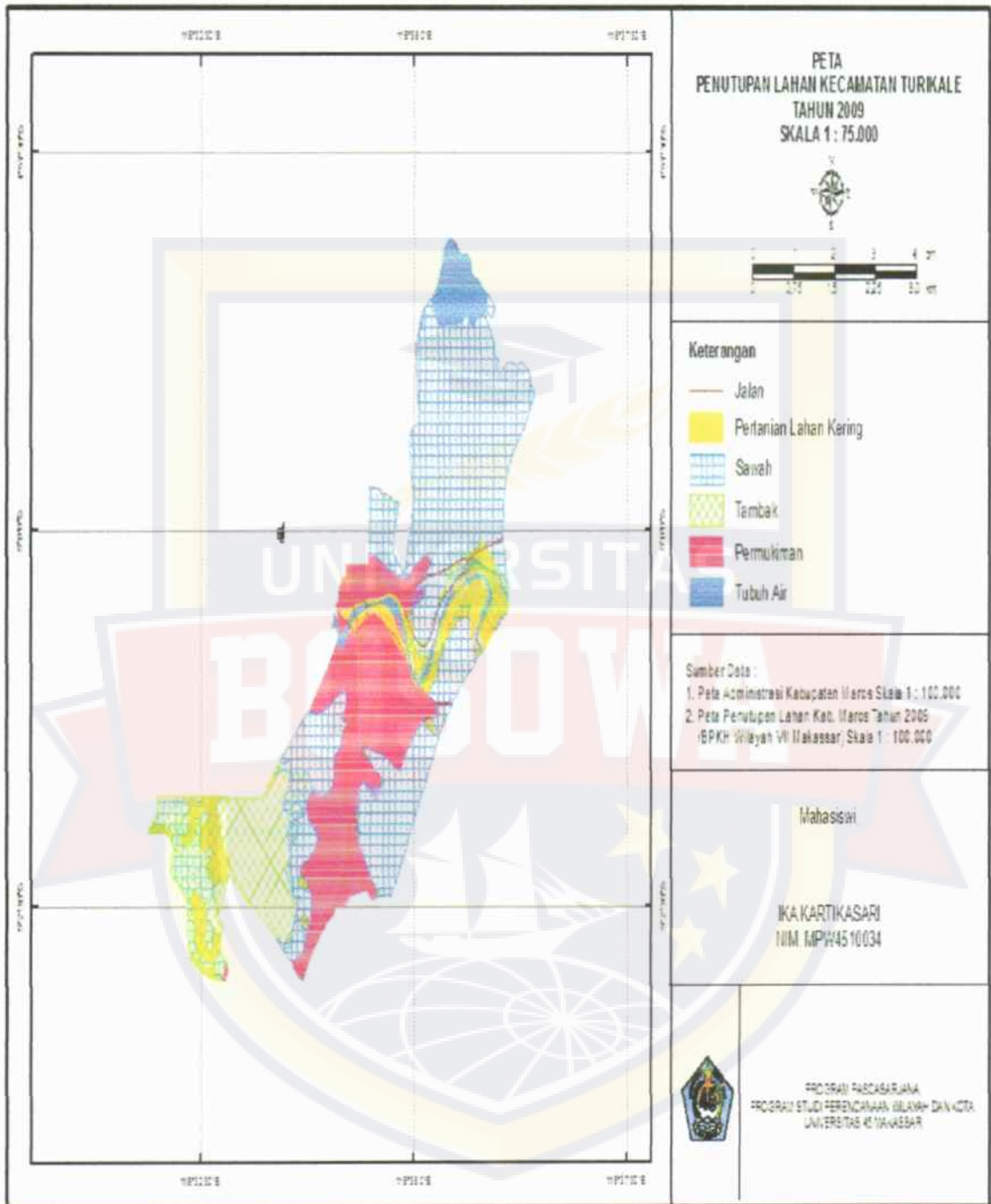
No.	Kelurahan	Jenis Sawah (Ha)		%
		Irigasi	Non Irigasi	
1	Taroadaa	-	141,87	4,70
2	Adatongeng	-	46,93	1,56
3	Pettuadae	-	94,35	3,15
4	Boribellayya	433,23	-	14,47
5	Raya	80,40	-	2,68
6	Turikale	83,97	-	2,80
7	Alliritengae	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>504,27</b>	<b>379,18</b>	<b>29,42</b>

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Maros

#### b. Luas Lahan Sawah Tahun 2010

Luas lahan sawah di Kecamatan Turikale pada tahun 2010 sebesar 880,75 Ha atau 29,42 % dari luas wilayah kecamatan ini, yang terbagi atas sawah irigasi seluas 597,6 Ha dan sawah non irigasi seluas 283,15 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan luas lahan sawah di Kecamatan Turikale pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan peta penutupan lahan tahun 2010 di Kecamatan Turikale diperlihatkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Peta Penutupan Lahan Kecamatan Turikale Tahun 2009



Sumber : Peta Administrasi Kabupaten Maros, 2009

Tabel 6. Luas Lahan Pertanian Sawah Menurut Kelurahan, di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros (Ha) Tahun 2010.

No.	Kelurahan	Jenis Sawah (Ha)		%
		Irigasi	Non Irigasi	
1	Taroadada	-	125,53	4,19
2	Adatongeng	-	75,38	2,51
3	Pettuadae	39,06	82,06	4,04
4	Boribellayya	283,2	96,21	12,67
5	Raya	99	-	3,30
6	Turikale	83,01	-	2,77
7	Alliritengae	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>597,6</b>	<b>283,15</b>	<b>29,48</b>

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Maros

### c. Luas Perubahan Lahan Sawah di Kecamatan Turikale

Pada tahun 2010 lahan sawah di Kecamatan Turikale mengalami perubahan sejak tahun 2005, yaitu jenis sawah irigasi meningkat 93,33 Ha dari 504,27 Ha menjadi 597,6 Ha atau sebesar 18,5 % sedangkan sawah non irigasi mengalami penurunan 96,03 Ha dari 379,18 Ha menjadi 283,15 Ha atau sebesar 25,33 %. Perubahan terbesar terdapat pada Kelurahan Taroadada yakni sebesar 16,34 Ha sejak tahun 2005. Luas perubahan lahan antara tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Luas Perubahan Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Tahun 2005-2010

No.	Kelurahan	Jenis Sawah (Ha)			
		Irigasi		Non Irigasi	
		2005	2010	2005	2010
1	Taroada	-	-	141,87	125,53
2	Adatongeng	-	-	46,93	75,38
3	Pettuadae	-	39,06	94,35	82,06
4	Boribellayya	433,23	283,2	-	96,21
5	Raya	80,40	99	-	-
6	Turikale	83,97	83,01	-	-
7	Alliritengae	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>504,27</b>	<b>597,6</b>	<b>379,18</b>	<b>283,15</b>

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Maros

d. Jumlah Pemohon IMB dari Lahan Sawah Berdasarkan Fungsi Bangunan dan Persentasenya di Kecamatan Turikale Kab. Maros Tahun 2005-2010

Dari data register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Maros, diketahui bahwa fungsi bangunan yang paling dominan dialihkan dari lahan sawah yaitu untuk peruntukan rumah tinggal, perumahan, ruko dan areal perkantoran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Jumlah Pemohon IMB dari Lahan Sawah Berdasarkan Fungsi Bangunan di Kec. Turikale Tahun 2005-2010

No.	Fungsi Bangunan	Jumlah Pemohon	Persentase (%)
1	Rumah Tinggal	321	58,15
2	Perumahan	53	9,6
3	Ruko	115	20,8
4	Perkantoran	26	4,7
5	Perdagangan	17	3,07
6	Gudang	11	1,9
7	Lainnya	9	5,9
<b>Jumlah</b>		<b>552</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Tata Ruang Kab. Maros



### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan responden, baik responden pemilik lahan sawah yang mengalihfungsikan lahannya ke penggunaan lain maupun responden masyarakat yang memilih untuk membeli lahan ex sawah untuk dijadikan pemukiman/perdagangan, diketahui bahwa mereka berangkat dari fenomena-fenomena yang ada seperti :

- a. *Harga lahan* yang ada di kota Makassar yang sudah sangat tinggi disebabkan kurangnya ketersediaan lahan akibat meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitasnya sehingga sudah cukup berat bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan untuk tempat tinggal di Kota Makassar.
- b. *Kemacetan* terjadi tidak hanya terjadi di titik tertentu tetapi sudah merambah ke hampir semua ruas jalan di kota Makassar. Pemkot telah berusaha memperlebar beberapa ruas jalan, menambah jalan baru. namun belum memadai untuk menampung pertumbuhan pengguna jalan yang terus meningkat. Hal ini mendorong sejumlah masyarakat untuk mencari areal lokasi pemukiman di luar wilayah kota yang letaknya cukup strategis dan tentunya jauh dari kepadatan kendaraan.

- c. *Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau*. Sejumlah areal di perkotaan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, ruang publik, telah tersingkir akibat pembangunan gedung-gedung yang cenderung berpola "kontainer" (*container development*) yakni bangunan yang secara sekaligus dapat menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi, seperti Mall, Perkantoran, Hotel, dan sebagainya. Ruang terbuka menciptakan karakter masyarakat kota. Tanpa ruang-ruang publik masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat *maverick* yang *nonkonformis-individualis-asosial*, yang anggota-anggotanya tidak mampu berinteraksi apalagi bekerja sama satu sama lain. Agar efektif sebagai mimbar, ruang publik haruslah netral. Artinya, bisa dicapai (hampir) setiap penghuni kota. Tidak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim diri sebagai pemilik dan membatasi akses ke ruang publik.
- d. *Rawan Banjir*. Penyebab genangan air di jalanan jika terjadi air pasang mengingat posisi Makassar di pinggir laut. Ketinggian air pasang di kawasan pantai di Makassar bisa mencapai 160 cm. Sementara permukaan kota Makassar dari laut hanya 120 cm. Ketika bersamaan curah air hujan tinggi dan air pasang, banjir dapat terjadi. Hal ini mendorong beberapa masyarakat mencari lokasi yang tepat untuk bermukim dan tentunya jauh dari lokasi banjir yang kerap terjadi di Kota Makassar.

Selain dari faktor yang mendorong beberapa masyarakat kota beralih ke wilayah luar dengan membeli lahan ex sawah untuk dijadikan lokasi pemukiman sehingga mendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain/lahan terbangun, terdapat pula faktor-faktor umum yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale serta bagaimana pengaruhnya yaitu :

**a. Faktor Kependudukan (X1)**

Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, jalanan, tempat rekreasi, dan sarana lainnya. Berikut data tentang tingkat perkembangan penduduk yang terdapat di Kecamatan Turikale seperti yang terlihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Tingkat Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Turikale Tahun 2010

Tingkat Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
0.41 – 0.50 %	12	32,43
0.31 – 0.40 %	10	27,02
0.21 – 0.30 %	8	21,62
0.10 – 0.20 %	7	18,91
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Survey

Hasil pengolahan data pengaruh faktor kependudukan terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Turikale dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Hubungan Faktor Kependudukan dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Tahun 2010

Perubahan Alih Fungsi Lahan	Faktor Kependudukan								Jumlah	
	Cukup		Sedang		Kurang		Sangat Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Kuat	5	13,51	4	10,81	4	10,81	1	2,70	14	37,83
Sedang	3	8,10	3	8,10	1	2,70	3	8,10	10	27,02
Lemah	3	8,10	2	8,10	1	2,70	1	2,70	7	18,91
Sangat Lemah	1	2,70	1	2,70	2	5,40	2	5,40	6	16,21
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>32,43</b>	<b>10</b>	<b>27,02</b>	<b>2</b>	<b>5,40</b>	<b>2</b>	<b>5,40</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Dari Tabel 10 di atas diperoleh  $X^2_{hitung} = 4,95$  ( Lampiran 2) pada taraf signifikansi 0,05 dan dapat dibebaskan  $(db) = (4-1) (4-1) = 9$  diperoleh  $X^2_{tabel} = 0,711$ . Hal ini bahwa  $X_{hitung}$  lebih besar daripada  $X^2_{tabel}$  sehingga  $h_0$  ditolak atau  $h_1$  diterima, dengan demikian terbukti bahwa ada pengaruh antara faktor kependudukan terhadap alih fungsi lahan di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

#### e. Faktor Ekonomi (X2)

Rendahnya insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non



pertanian, atau lainnya), seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya.

Berikut data tentang tingkat pendapatan masyarakat yang terdapat di Kecamatan Turikale seperti yang terlihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Tingkat Pendapatan Masyarakat Per Bulan di Kecamatan Turikale Tahun 2010

Tingkat Pendapatan Masyarakat (Rp.)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
> 3.000.000	16	43,24
2.000.000 – 3.000.000	11	29,72
1.000.000 – 2.000.000	6	16,21
< 1.000.000	2	5,40
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Survey

Hasil pengolahan data pengaruh faktor ekonomi terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Turikale dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Hubungan Faktor Ekonomi dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Tahun 2010

Perubahan Alih Fungsi Lahan	Faktor Ekonomi / Tingkat Pendapatan								Jumlah	
	Cukup		Sedang		Kurang		Sangat Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Kuat	9	24,32	5	13,51	1	2,70	0	0	15	40,54
Sedang	5	13,51	3	8,10	1	2,70	1	2,70	10	27,02
Lemah	1	2,70	1	2,70	2	5,40	1	2,70	5	13,51
Sangat Lemah	1	2,70	2	5,40	2	5,40	0	0	5	13,51
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>43,24</b>	<b>11</b>	<b>29,72</b>	<b>6</b>	<b>16,21</b>	<b>2</b>	<b>5,40</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Dari Tabel 12 di atas diperoleh  $X^2_{hitung} = 10,06$  ( Lampiran 3) pada taraf signifikansi 0,05 dan dapat dibebaskan  $(db) = (4-1)(4-1) = 9$  diperoleh  $X^2_{tabel} = 0,711$ . Hal ini bahwa  $X_{hitung}$  lebih besar daripada  $X^2_{tabel}$  sehingga  $h_0$  ditolak atau  $h_1$  diterima, dengan demikian terbukti bahwa ada pengaruh antara faktor ekonomi / tingkat pendapatan terhadap alih fungsi lahan di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

#### f. Faktor Investasi Pihak Swasta (X3)

Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antar lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian oleh pihak swasta mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang telah ada.

Berikut data tentang tingkat penjualan lahan sawah ke pihak swasta yang terdapat di Kecamatan Turikale seperti yang terlihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Tingkat Penjualan Lahan Sawah Ke Pihak swasta di Kecamatan Turikale Tahun 2010

Tingkat Penjualan Pihak Swasta	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Menjual seluruh sawah ke swasta	19	51,35
Menjual sebagian besar sawahnya	10	27,02
Menjual sebagian kecil sawahnya	3	8,10
Tidak mau menjual sawahnya	6	16,21
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Survey

Hasil pengolahan data pengaruh faktor investasi pihak swasta terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Turikale dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Hubungan Faktor Investasi Pihak swasta dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Turikale Tahun 2010

Perubahan Alih Fungsi Lahan	Faktor Ekonomi / Tingkat Pendapatan								Jumlah	
	Cukup		Sedang		Kurang		Sangat Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Kuat	9	24,32	4	10,81	1	2,70	2	5,40	16	43,24
Sedang	7	18,91	3	8,10	1	2,70	3	8,10	14	37,83
Lemah	2	5,40	1	2,70	0	0	1	2,70	4	10,81
Sangat Lemah	1	2,70	2	5,40	1	2,70	0	0	4	10,81
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>51,35</b>	<b>10</b>	<b>27,02</b>	<b>3</b>	<b>8,10</b>	<b>6</b>	<b>16,21</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Dari Tabel 14 di atas diperoleh  $X^2_{hitung} = 4,71$  ( Lampiran 4) pada taraf signifikansi 0,05 dan dapat dibebaskan  $(db) = (4-1)(4-1) = 9$  diperoleh  $X^2_{tabel} = 0,711$ . Hal ini bahwa  $X_{hitung}$  lebih besar daripada  $X^2_{tabel}$  sehingga  $h_0$  ditolak atau  $h_1$  diterima, dengan demikian terbukti bahwa ada pengaruh antara faktor investasi pihak swasta terhadap alih fungsi lahan di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

### g. Faktor Intervensi Pemerintah Daerah (X4)

Faktor intervensi Pemerintah Daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan alih fungsi lahan, dimana dalam menyikapi aturan pemerintah, ada masyarakat yang mengikuti aturan pemerintah, cenderung mau berpartisipasi mengikuti aturan yang ada, ada yang cenderung tidak mau berpartisipasi mengikuti aturan yang ada dan ada masyarakat yang sama sekali tidak mau berpartisipasi mengikuti aturan pemerintah.

Berikut data tentang tingkat partisipasi masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang terdapat di Kecamatan Turikale seperti yang terlihat pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Aturan Pemerintah yang Ada di Kecamatan Turikale Tahun 2010

Tingkat Penjualan Pihak Swasta	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Mengikuti aturan Pemerintah	9	24,32
Cenderung mau berpartisipasi mengikuti aturan	15	40,54
Cenderung tidak mau berpartisipasi mengikuti aturan	6	16,21
Sama sekali tidak mau mengikuti aturan	7	18,91
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Survey

Hasil pengolahan data pengaruh faktor intervensi Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Turikale dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.



Tabel 16. Hubungan Faktor Intervensi Pemerintah Daerah dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kec. Turikale Tahun 2010

Perubahan Alih Fungsi Lahan	Tingkat Pendapatan Masyarakat								Jumlah	
	Cukup		Sedang		Kurang		Sangat Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Kuat	4	10,81	5	13,51	1	2,70	2	5,40	12	32,43
Sedang	2	5,40	7	18,91	1	2,70	3	8,10	13	35,13
Lemah	1	2,70	1	2,70	3	8,10	1	2,70	6	16,21
Sangat Lemah	2	5,40	2	5,40	1	2,70	1	2,70	6	16,21
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>24,32</b>	<b>15</b>	<b>40,54</b>	<b>6</b>	<b>16,21</b>	<b>7</b>	<b>18,91</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Dari Tabel 16 di atas diperoleh  $X^2_{hitung} = 4,71$  ( Lampiran 4) pada taraf signifikansi 0,05 dan dapat dibebaskan  $(db) = (4-1)(4-1) = 9$  diperoleh  $X^2_{tabel} = 0,711$ . Hal ini bahwa  $X_{hitung}$  lebih besar daripada  $X^2_{tabel}$  sehingga  $h_0$  ditolak atau  $h_1$  diterima, dengan demikian terbukti bahwa ada pengaruh antara faktor intervensi Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi lahan di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

## B. Pembahasan

Penduduk dengan latar belakang yang berbeda, menimbulkan variasi kegiatan yang berbeda-beda pula sehingga menimbulkan dampak dalam perkembangan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang tinggi dan bervariasi dapat menjadi modal sumber daya manusia bagi suatu wilayah untuk memacu pertumbuhannya. Salah satu indikator yang menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah adalah tingkat kemudahan dalam memperoleh kebutuhan hidupnya. Sedangkan salah satu indikator yang mempengaruhi pemanfaatan fungsi lahan pada suatu wilayah adalah tingkat kepadatan penduduknya.

Fungsi lahan dikatakan berubah jika terdapat peralihan penggunaan dari yang sebelumnya dengan saat ini, dengan indikasi terjadinya selisih luas pemanfaatan lahan masing-masing dan terjadinya perubahan penggunaan lahan berdasarkan pengamatan lapangan yang tertuang dalam overlay peta atau metode tumpang tindih peta. Pada tahun 2010 lahan sawah di Kecamatan Turikale mengalami perubahan sejak tahun 2005, yaitu jenis sawah irigasi meningkat 93,33 Ha dari 504,27 Ha menjadi 597,6 Ha atau sebesar 18,5 % sedangkan sawah non irigasi mengalami penurunan 96,03 Ha dari 379,18 Ha menjadi 283,15 Ha atau sebesar 25,33 %.

Dari data register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Maros, diketahui bahwa fungsi bangunan yang paling dominan dialihkan dari lahan sawah yaitu untuk peruntukan rumah

tinggal, perumahan, ruko dan areal perkantoran, sedangkan dari hasil kuisioner responden, diperoleh informasi bahwa Kelurahan Taroda merupakan kelurahan yang paling banyak mengalihfungsikan lahan sawahnya. Kelurahan Raya, Alliritengae dan Turikale tidak dimasukkan ke dalam sampel responden sebab tidak terdapat lahan sawah di daerah tersebut. Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale cenderung untuk peruntukan rumah tinggal, areal, lokasi perkantoran, bangunan ruko, dan peruntukan lainnya.

Perubahan alih fungsi lahan sawah yang terjadi di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dapat diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, baik dari penduduk setempat maupun penduduk yang bermigrasi dari kota Makassar dimana mereka membutuhkan lahan untuk membangun tempat tinggal serta melakukan aktivitas lainnya, sementara lahan yang tersedia tetap sehingga lahan yang ada salah satunya lahan persawahan dijadikan daerah terbangun.

Di Kecamatan Turikale setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk yaitu pada tahun 2005 berjumlah 34.972 jiwa dengan kepadatan penduduk 11.050 jiwa/Km<sup>2</sup> kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 41.379 jiwa dengan kepadatan penduduk 12.213 jiwa/Km<sup>2</sup>. Adapun kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Alliritengae dengan kepadatan 2.721 jiwa/Km<sup>2</sup>

sedangkan kelurahan yang mempunyai kepadatan terendah yaitu Kelurahan Boribellaya dengan kepadatan penduduk hanya 490 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dari hasil analisis Chi-Kuadrat juga dibuktikan bahwa faktor kependudukan mempunyai pengaruh nyata terhadap terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan ini.

Faktor ekonomi selanjutnya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale. Faktor ekonomi identik dengan masalah kesejahteraan. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya. Masyarakat ada yang beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk kegiatan lain dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan. Di sisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi, sehingga petani lebih memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan non-pertanian. Selain itu keputusan kepala keluarga untuk melepas penguasaan lahan diduga dipengaruhi pula perubahan penilaian terhadap lahan yang semula merupakan satu-satunya sumber penghasilan menjadi salah satu komoditi yang dapat dialihkan pemilikannya, sebagian atau seluruhnya. Perubahan tersebut diduga



berkaitan dengan lama tinggal, beban konsumsi keluarga petani yang diidentifikasi melalui jumlah tanggungan atau anggota keluarga pemilik lahan serta biaya konsumsi per kapita. Berdasarkan hasil analisis Chi-Kuadrat, faktor ekonomi memiliki pengaruh kuat terhadap terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Turikale.

Adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan produktif milik warga untuk pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Lokasi dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya. Areal sawah yang subur dengan irigasi yang baik lebih menjadi incaran para *developer* karena biasanya dilengkapi fasilitas jalan yang baik. Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian mengingat harganya yang relatif murah. Hasil analisis Chi-Kuadrat dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat kaitan antara faktor investasi pihak swasta terhadap alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale.

Faktor intervensi Pemerintah Daerah juga menjadi salah faktor yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale. Hal ini terkait dengan keadaan masyarakat yang cenderung mengikuti / berpartisipasi pada aturan yang ada. Melalui analisis Chi-

Kuadrat, terdapat tingkat pengaruh yang nyata antara faktor intervensi Pemerintah Daerah dengan terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kecamatan ini.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan apabila dibandingkan dengan teori Pusat Pertumbuhan yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendorong masyarakat untuk mengalih fungsikan lahan sawahnya. Pada Teori Pusat Pertumbuhan Terdapat dua pendekatan di dalam Teori Growth Pole, antara lain secara fungsional suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang sifat hubungannya, memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya), dan secara geografis suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah yang bersangkutan dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada. Berbeda dengan kenyataan yang diperoleh pada penelitian ini, dimana tidak selamanya industri sebagai daya tarik, akan tetapi masyarakat kota Makassar cenderung untuk mencari lahan yang berada di wilayah pinggir atau ke wilayah kabupaten di sebelah kota Makassar, dalam hal ini Kabupaten Maros dengan alasan harga lahan yang ada di Kota Makassar relatif tinggi,

seringnya terjadi kemacetan, kurangnya ruang terbuka hijau di kota dan Makassar kerap dilanda banjir pada wilayah-wilayah tertentu. Disini dapat diketahui bahwa Kota Makassar sendiri adalah sebagai pemicu terjadinya alih fungsi lahan sawah ke lahan terbangun, oleh karena meningkatnya kebutuhan akan lahan bagi penduduk kota Makassar, meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan pembangunan seperti pemukiman, perdagangan terutama di sekitar perbatasan Maros – Makassar, yang lebih merupakan limpahan kegiatan dan kebutuhan penduduk kota Makassar daripada akibat perkembangan kegiatan atau peningkatan kebutuhan penduduk setempat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

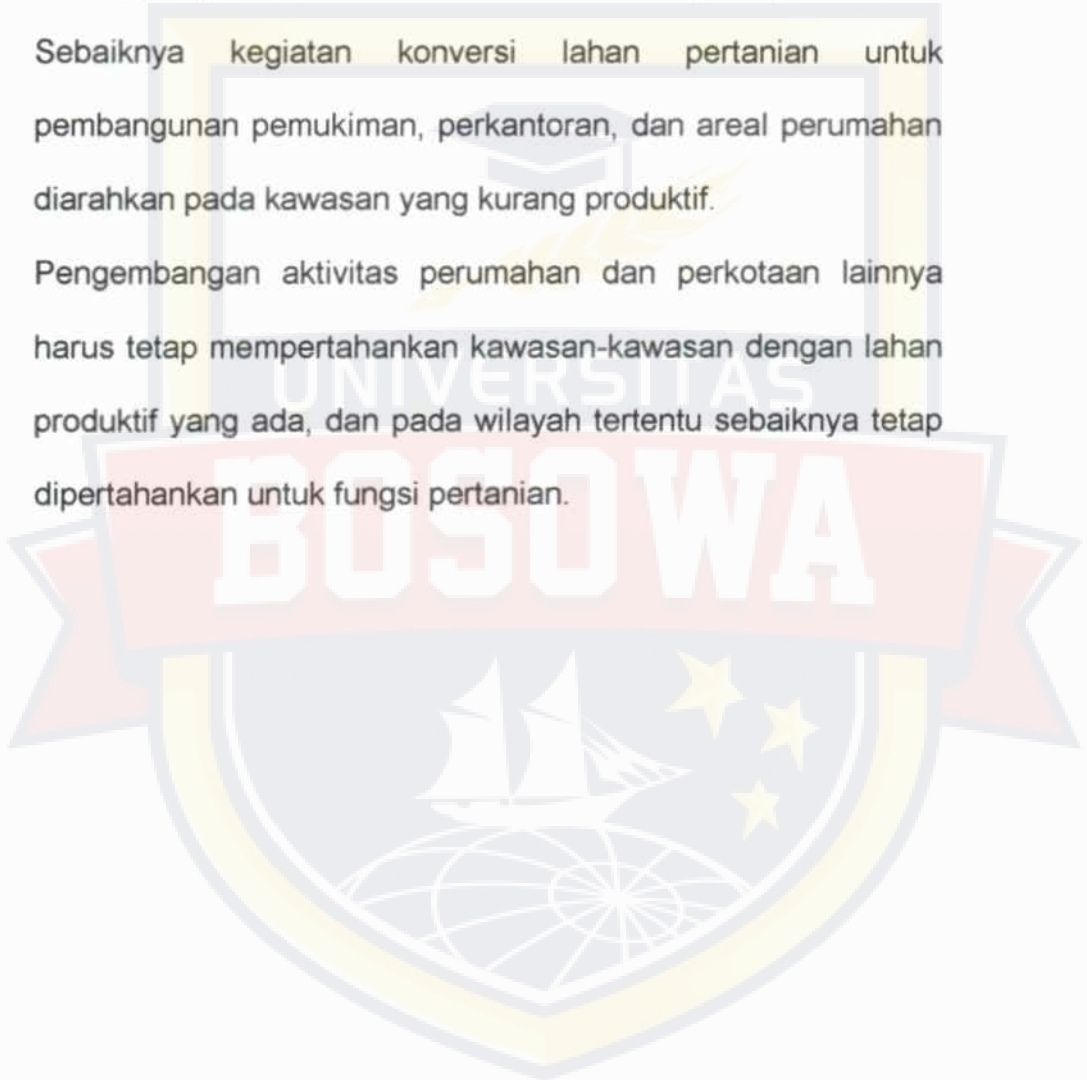
#### A. Kesimpulan

1. Perubahan alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros cenderung untuk penggunaan rumah tinggal, areal perumahan, lahan perkantoran dan bangunan ruko, yang terjadi di Kelurahan Taroda, Kelurahan Adatongeng, Kelurahan Pettuadae dan Kelurahan Boribellaya.
2. Faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros adalah faktor ekonomi, dimana berdasarkan hasil analisis Chi-Kuadrat memiliki pengaruh yang paling kuat diantara faktor lainnya serta adanya fenomena semakin berkembangnya Kota Makassar sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan bagi penduduknya.



## B. Saran

1. Kebijakan pengendalian konversi lahan sawah harus dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan karena konversi lahan akan terjadi seiring dengan urbanisasi yang terus berlangsung karena akan menimbulkan berbagai implikasi.
2. Sebaiknya kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan pemukiman, perkantoran, dan areal perumahan diarahkan pada kawasan yang kurang produktif.
3. Pengembangan aktivitas perumahan dan perkotaan lainnya harus tetap mempertahankan kawasan-kawasan dengan lahan produktif yang ada, dan pada wilayah tertentu sebaiknya tetap dipertahankan untuk fungsi pertanian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. 2011. *Kabupaten Maros Dalam Angka 2011*. Pemerintahan Kabupaten Maros. Maros.
- Bappenas. 2006. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- BPN. 2004. *Inventarisasi dan Zonasi Tanah Sawah Beririgasi di Indonesia*. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*. LP3ES. Jakarta
- Hayat, S. 2002. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah*. Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Irawan B., dkk. 2005. *Dampak Konversi Lahan sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengendaliannya*. Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Isa I. 2004. *Strategi Pengendalian Konversi Lahan Pertanian*. Badan Litbang Departemen Pertanian MAFF Japan dan ASEAN Secretariat. Jakarta.
- J. Winoto. 2005. *Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan*. Hasil Kerjasama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.
- Kustiawan, Iwan. 1997. *Permasalahan Konversi Lahan pertanian dan Implikasinya terhadap Penataan Ruang Wilayah Studi Kasus : Wilayah Pantai Utara Jawa*. Jurnal PWK Vol.8. No 1/Januari 1997.
- Lestari. 2000. *Pembangunan Pertanian di Persimpangan Jalan*. Kompas. Jakarta
- Maulana, F. 1999. *Konservasi Lahan Pertanian di Pantura Jawa Barat*. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

- Nasoetion, I. 1998. *Keterkaitan antara Pergeseran Struktur Perekonomian Wilayah, Penggunaan Lahan dan Tenaga Kerja*. Skripsi. Departemen Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nuryati, L . 1995. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Kepenggunaan Non Sawah* . Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pasandaran, Effendi. 2006. *Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia*. Jurnal Litbang pertanian 25(4) 2006.
- Putri, B 1995. *Transformasi Struktur Ekonomi dan Pembangunan Pertanian*. Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Situmenang, M. 1998. *Pola Hubungan antara Perubahan Penggunaan Lahan dengan Transformasi Struktur Ekonomi*. Skripsi. Departemen Ilmu-ilmu Tanah. Fakulatas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sumaryanto, N. 1994. *Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dan Proyek Pembinaan Kelembagaan Penelitian Pertanian Nasional. Bogor.
- Tyadi, I.H. 1995. *Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi Propinsi Jawa Barat Tahun 1977-1993*. Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Utomo, M. 1992. *Alih Fungsi Lahan : Tinjauan Analitis dalam Makalah Seminar Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*. Universitas Lampung. Lampung.



**PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI  
LAHAN PERTANIAN DI INDONESIA**

1. **Pemendagri No. 5/Tahun 1974**, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan

*Ringkasan:*

Dalam menetapkan lokasi bagi perusahaan (pasal 7 ayat 3), maka:

- a. Sejauh mungkin dihindarkan pengurangan areal pertanian yang subur.
- b. Sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak atau kurang produktif.
- c. Dihindarkan pemindahan penduduk dari tempat kediamannya.
- d. Diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran/pencemaran bagi daerah lingkungan yang bersangkutan.

2. **Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410.1850, Tahun 1994**, Kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN perihal perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian.

*Ringkasan:*

Berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis dan program swasembada pangan, maka kepada BKTRN disarankan untuk mengambil langkah:

- a. Menyiapkan kebijakan mengenai petunjuk penyusunan dan perubahan RTRW Kabupaten/Kotamadya agar sawah beririgasi teknis tidak diperuntukkan lagi bagi penggunaan tanah non pertanian.
- b. Menyiapkan pedoman dan petunjuk pemekaran wilayah kota sehingga pemekarannya sesedikit mungkin menggunakan sawah beririgasi teknis.
- c. Petunjuk penyusunan RTRW Kabupaten/Kotamadya yang wilayahnya hampir seluruhnya terdiri dari sawah beririgasi teknis dan perkampungan, sedangkan permintaan tanah untuk penggunaan tanah non pertanian sangat besar dan terus menerus.

3. **Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-1851 Tahun 1994**, Kepada Gubernur KDH Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II perihal pencegahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian melalui penyusunan RTR.



*Ringkasan:*

- a. Dalam menyusun RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya agar tidak memperuntukkan tanah sawah beririgasi teknis guna penggunaan tanah non pertanian.
- b. Apabila terpaksa memperuntukkan tanah sawah beririgasi teknis guna penggunaan tanah non pertanian karena pertimbangan tertentu, agar lebih dahulu dikonsultasikan dengan BKTRN

4. **Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-1851 Tahun 1994**, Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya perihal pencegahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian

*Ringkasan:*

- a. Larangan untuk melakukan tindakan yang mengarah pada pengurangan luas tanah sawah beririgasi teknis.
- b. Larangan untuk memberikan persetujuan izin pengeringan tanah sawah beririgasi teknis.
- c. Pemberian bantuan secara aktif kepada Pemda Tingkat I dan Tingkat II dalam penyusunan RTRW.

5. **Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN No.5335/MK/9/1994 Tahun 1994**, Kepada Menteri Dalam Negeri perihal penyusunan RTRW Dati II.

*Ringkasan:*

- a. Tidak mengizinkan perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan di luar pertanian.
- b. Meninjau secara keseluruhan RTRW baik pada Dati II maupun Dati I.
- c. Mendagri diharap memberi petunjuk kepada Dati II untuk menyempurnakan RTRW yang di dalam RTRW-nya terdapat penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan bukan pertanian.

6. **Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN No. 5417/MK/10/1994 Tahun 1994**, Kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat RI perihal efisiensi pemanfaatan lahan bagi perumahan.

*Ringkasan:*

- a. Tidak mengizinkan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan di luar pertanian.
- b. Meningkatkan upaya pembangunan perumahan bertingkat untuk semua golongan masyarakat.
- c. Pembangunan perumahan baru, supaya diarahkan ke lahan yang telah berizin lokasi. Jika memang diperlukan lokasi baru maka agar diarahkan ke lahan di luar lahan beririgasi teknis.

7. **Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.460-3346 Tahun 1994**, Kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya perihal perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian.

*Ringkasan:*

- a. Tidak memasukkan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian.
- b. Merubah peruntukan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian dalam RTRW menjadi tetap sebagai sawah beririgasi teknis.

8. **Surat Menteri Dalam Negeri No.474/4263/S/Sj Tahun 1994**, Kepada Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia perihal peninjauan kembali RTRW Provinsi Dati I dan RTRW Kabupaten/Kotamadya Dati II.

*Ringkasan:*

- a. Tidak mengizinkan perubahan penggunaan lahan pertanian irigasi teknis menjadi penggunaan non pertanian.
- b. Mengamankan jaringan irigasi teknis yang ada dan memanfaatkannya semaksimal mungkin.
- c. Mengevaluasi kembali RTRW Dati II bila di dalamnya tercantum rencana penggunaan lahan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan bukan pertanian.

9. **Surat Menteri Sekretaris Negara No. 164/IV.Sesneg/05/1996 Tahun 1996**, Kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN perihal permohonan persetujuan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis untuk proyek industri pemurnian minyak di kabupaten Situbondo Jawa Timur.

*Ringkasan:*

Petunjuk Presiden menegaskan bahwa lahan beririgasi teknis agar tetap dipertahankan fungsinya untuk pertanian.

10. **Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.460-1594 Tahun 1996**, Kepada Gubernur KDHTingkat I dan Bupati/Walikota Kotamadya KDH Tingkat II perihal pencegahan konversi tanah sawah irigasi teknis menjadi tanah kering.

*Ringkasan:*

- a. Masih ada kasus/upaya untuk merubah tanah sawah beririgasi teknis yaitu:
  - Pemilik tanah sengaja mengeringkan tanah sawah beririgasi teknis dengan menutup saluran irigasi dan tidak menanam dengan padi sehingga menjadi tegalan.
  - Tanahnya dibantu pensertifikatannya oleh oknum pengusaha dan dialihkan dengan transaksi di bawah tangan dari pemilik ke oknum pengusaha, kemudian oleh oknum pengusaha tanah tersebut dikeringkan.
- b. Tanah kering tersebut kemudian diajukan permohonan izin lokasinya dimana peruntukannya sudah sesuai dengan rencana tata ruang (peruntukan non pertanian). Dari sisi hukum hal semacam ini sulit ditolak oleh BPN.



- c. Terhadap kasus tersebut diminta perhatian Gubernur dan Bupati / Walikota untuk memberi petunjuk kepada masyarakat agar:
- tidak menutup saluran irigasi yang mengairi sawah beririgasi teknis milik mereka.
  - Tidak mengeringkan sawah beririgasi teknis miliknya dan menjadikan tanah kering.
  - Tidak menimbun (mengurug) sawah beririgasi teknis miliknya untuk keperluan bangunan.
  - Bagi yang telah merubah sawah beririgasi teknis miliknya menjadi tanah kering supaya mengembalikannya seperti semula.

11. **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998**, tentang pemanfaatan tanahkosong untuk tanaman pangan.

*Ringkasan:*

- Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan serta tanah yang telah diperoleh dasar penguasaannya tapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seluruh atau sebagiannya belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau RTRW yang berlaku.
- Pihak yang berhak atas tanah memiliki tanggung jawab atas pemanfaatan tanah dan melakukannya secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain dalam pemanfaatan tanah.
- Pemanfaatan untuk tanaman pangan dilaksanakan sampai pihak yang berhak atas tanah berkemampuan untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau RTRW yang berlaku.
- Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka:
  - Pihak yang berhak atas tanah diwajibkan mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan pengaturan melalui pihak Pemda atau Instansi Pemerintah lain tanpa menyebabkan kerugian pada pihak yang berhak atas tanah.
  - Jika tidak dilaksanakan juga maka tanah tersebut masuk dalam daftar penetapan tanah terlantar setelah diberikan peringatan pertama dan untuk selanjutnya akan dilakukan peringatan berjenjang.
- Tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu atau tanaman sayuran semusim.

12. **Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1998**, tentang pemberian izin lokasi dalam rangka penataan penguasaan tanah skala besar.

*Ringkasan:*

- Pencadangan tanah melalui pemberian izin lokasi kepada badan hukum atau sekelompok badan hukum tidak boleh melebihi batas luas maksimum yang diperkenankan.

- b. Untuk tanah yang sudah dikuasai, maka tanah kelebihan dari luas maksimum yang diperkenankan yang berada dalam suatu hamparan lokasi akan dilelang/atau dialokasikan kepada investor baru dengan mengutamakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta dapat bekerjasama dengan investor lama dalam satu satuan usaha.
- c. Jika pengusahaannya telah melebihi dari luas maksimum yang diperkenankan dan letaknya terpencar-pencar, maka untuk menjadikannya dalam suatu hamparan dengan cara tukar menukar atau konsolidasi tanah.
- d. Luas maksimum yang diperkenankan untuk wilayah Pulau Jawa:
- Kawasan perumahan 400 ha
  - Kawasan resort 200 ha
  - Kawasan industri 400 ha
  - Perkebunan dengan HGU selain komoditas tebu 20 000 ha
  - Perkebunan tebu 60 000 ha
  - Pertanian/tambak 100 ha
- Untuk kelompok badan usaha luasnya 10 (sepuluh) kali luas maksimum tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia.

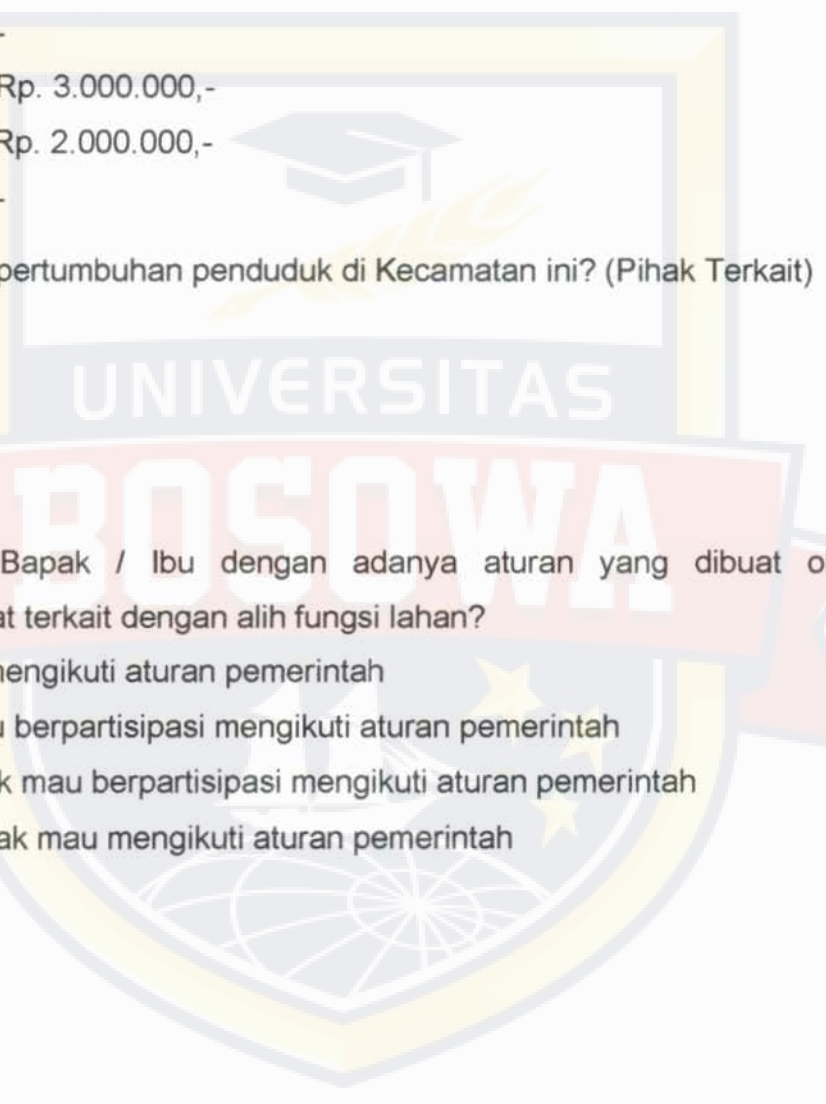




## KUISIONER PENELITIAN

### “KECENDERUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH KE PENGGUNAAN LAIN DI KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS”

- 
1. Biodata Responden (Pemilik Lahan /Tokoh Masyarakat)
    - Nama : .....
    - Pekerjaan : .....
    - Alamat : .....
    - Pendidikan : .....
  2. Apakah Bapak / Ibu tahu di daerah ini terdapat lahan yang dahulunya sawah tetapi sekarang beralih fungsi penggunaannya?  
.....
  3. Bagaimana status lahan tersebut?
    - a. Hak Milik
    - b. Hak Pakai
    - c. Hak Sewa
    - d. Milik Pemerintah
  4. Mengapa sawah tersebut beralih fungsi?
    - a. Ketersediaan fasilitas/sarana yang mendukung di sekitarnya (lokasi strategis)
    - b. Lahan yang kurang produktif
    - c. Beralih sektor lain yang lebih potensial
    - d. Investasi
    - e. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah
    - Lainnya .....
  5. Lahan yang beralih fungsi tersebut dimanfaatkan untuk apa?
    - a. Pemukiman
    - b. Perkantoran
    - c. Industri
    - d. Perdagangan
    - e. Lainnya .....

6. Jika ada investor / pihak swasta yang menawarkan membeli lahan sawah Saudara, bagaimana sikap anda?
- Menjual seluruh lahan sawah yang diminati investor
  - Menjual sebagian besar lahan sawah
  - Menjual hanya sebagian kecil saja
  - Tidak mau menjual lahan sawah yang dimiliki
7. Bagaimana tingkat pendapatan setelah terjadinya alih fungsi lahan tersebut?
- > Rp. 3.000.000,-
  - Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000,-
  - Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000,-
  - < Rp. 1.000.000,-
7. Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan ini? (Pihak Terkait)
- 0.41 – 0.50 %
  - 0.31 – 0.40 %
  - 0.21 – 0.30 %
  - 0.10 – 0.20 %
8. Bagaimana sikap Bapak / Ibu dengan adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah setempat terkait dengan alih fungsi lahan?
- Berpartisipasi mengikuti aturan pemerintah
  - Cenderung mau berpartisipasi mengikuti aturan pemerintah
  - Cenderung tidak mau berpartisipasi mengikuti aturan pemerintah
  - Sama sekali tidak mau mengikuti aturan pemerintah
- 

**DATA RESPONDEN PENELITIAN  
(KEC. TURIKALE KAB. MAROS)**

O.	NAMA RESPONDEN	ALAMAT	KELURAHAN	FUNGSI BARU LAHAN
1	Hj. Nurlina	Jl. Jend. A. Yani	Taroadada	Rumah Tinggal
2	Supardi, SH	Jl. Jend. A. Yani	Taroadada	Rumah Tinggal
3	Syarifuddin	Jl. Jend. A. Yani	Taroadada	Rumah Tinggal
4	A. Paweoi	Jl. Ratulangi	Taroadada	Ruko
5	H. Hamid	Jl. Ratulangi	Taroadada	Ruko
5	Hasan Basri	Lingk. Ballu	Taroadada	Perumahan
7	Puang Nai	Lingk. Ballu	Taroadada	Perumahan
8	Abd. Madjid	Lingk. Ballu	Taroadada	Perumahan
9	-	Lingk. Ballu	Taroadada	Perumahan
0	A. Fatimah Nasri	Lingk. Ballu	Taroadada	Rumah Tinggal
1	Syamsul	Lingk. Ballu	Taroadada	Rumah Tinggal
2	Sohrati	Jl. Bahagia	Taroadada	Pagar
3	Darma	Jl. Bahagia	Taroadada	Rumah Tinggal
4	A. Zulkifli	Lingk. Bonto Manurung	Adatongeng	Rumah Tinggal
5	Mochtar Salam	Lingk. Bonto Manurung	Adatongeng	Rumah Tinggal
6	Suhaeni, SPd	Jl. Baji Maccini	Adatongeng	Rumah Tinggal
7	Drs. Suhendra	Jl. Baji Maccini	Adatongeng	Rumah Tinggal
8	Abd. Rahman	Jl. Baji Maccini	Adatongeng	Rumah Tinggal
9	Abd. Azis	Jl. Poros Maros	Adatongeng	Ruko
0	Mustamin Yahya	Jl. Poros Maros	Adatongeng	Ruko
1	Rosdiana	Jl. Poros Maros	Adatongeng	Rumah Tinggal
2	Hj. Tini	Jl. Poros Maros	Adatongeng	Rumah Tinggal
3	Jaya	Jl. Poros Maros	Adatongeng	Rumah Tinggal
4	Ibrahim, SP	Jl. Asoka	Pettuadae	Perkantoran
5	Denny Maja	Jl. Asoka	Pettuadae	Perkantoran
6	Gunawan Effendy	Jl. Asoka	Pettuadae	Perkantoran
7	Zainuddin Thamrin	Jl. Asoka	Pettuadae	Perkantoran
8	-	Jl. Asoka	Pettuadae	Perkantoran
9	Hj. Dahniar	Jl. Asoka	Pettuadae	Perkantoran
0	Iskandar Makmur	Jl. Kemauan	Pettuadae	Rumah Tinggal
1	Fatimah Wahab	Jl. Kemauan	Pettuadae	Rumah Tinggal
2	Dg. Lipung	Jl. Anoa	Boribellaya	Rumah Tinggal
3	Mahmud Suyuti	Jl. Anoa	Boribellaya	Rumah Tinggal
4	Hamzah	Lingk. Kassi Kassi	Boribellaya	Perumahan
5	Vivian Daly	Lingk. Kassi Kassi	Boribellaya	Perumahan
6	-	Lingk. Kassi Kassi	Boribellaya	Perumahan
7	Ahmad Syukur	Lingk. Kassi Kassi	Boribellaya	Perumahan

**PERHITUNGAN CHI-KUADRAT VARIABEL KEPENDUDUKAN DENGAN PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

X	X				Σ	Fh				X <sup>2</sup>				Σ
	X1	X2	X3	X4		1	2	3	4	1	2	3	4	
Y1	5	4	4	1	14	4,5405	3,7838	3,027	2,6486	0,0465	0,0124	0,3127	1,0262	1,39779
Y2	3	3	1	3	10	3,2432	2,7027	2,1622	1,8919	0,0182	0,0327	0,6247	0,649	1,32464
Y3	3	2	1	1	7	2,2703	1,8919	1,5135	1,3243	0,2346	0,0062	0,1742	0,0794	0,49439
Y4	1	1	2	2	6	1,9459	1,6216	1,2973	1,1351	0,4598	0,2383	0,3806	0,6589	1,7377
Σ	12	10	8	7	37									4,95452
X <sup>2</sup>														4,95452
db														9
X <sup>2</sup> tab α = 0.05														0,711
C														0,4906
C max														0,9
simpulan	Ada Pengaruh													Tolak Ho

rangian :

- : Kecenderungan melakukan alih fungsi lahan sawah
- 1 : Kuat / Mau
- 2 : Sedang
- 3 : Lemah
- 4 : Tidak Mau / Sangat Lemah
- : Kependudukan
- 1 : Cukup
- 2 : Sedang
- 3 : Kurang
- 4 : Sangat Kurang
- 1 : Frekuensi Harapan
- 2 : Chi- Kuadrat
- 3 : Derajat Bebas
- 4 : Jumlah

$\chi^2 = \frac{4,9545}{37 + 4,9545} = 0,4906$  (Pengaruhnya Sedang )

$\alpha = \sqrt{\frac{4-1}{4}} = 0,9$

simpulan : Dengan melihat interval koefisien nilai C , maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan variabel pengaruhnya Sedang



**PERHITUNGAN CHI-KUADRAT VARIABEL EKONOMI / TINGKAT PENDAPATAN DENGAN PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

X	X				Σ	Fh				X <sup>2</sup>				Σ
	X 1	X 2	X 3	X 4		1	2	3	4	1	2	3	4	
Y 1	9	5	1	0	15	6,8571	4,7143	2,5714	0,8571	0,6696	0,0173	0,9603	0,8571	2,50442
Y 2	5	3	1	1	10	4,5714	3,1429	1,7143	0,5714	0,0402	0,0065	0,2976	0,3214	0,66572
Y 3	1	1	2	1	5	2,2857	1,5714	0,8571	0,2857	0,7232	0,2078	1,5238	1,7857	4,24053
Y 4	1	2	2	0	5	2,2857	1,5714	0,8571	0,2857	0,7232	0,1169	1,5238	0,2857	2,64962
Σ	16	11	6	2	35									10,0603
X <sup>2</sup>														10,0603
db														9
X <sup>2</sup> tab α = 0.05														0,711
C														0,6
C max														0,9
kesimpulan	Ada Pengaruh													Tolak Ho

Perangan :

- Y : Kecenderungan melakukan alih fungsi lahan sawah
- 1 : Kuat / Mau
- 2 : Sedang
- 3 : Lemah
- 4 : Tidak Mau / Sangat Lemah
- X : Ekonomi / Pendapatan
- 1 : Cukup
- 2 : Sedang
- 3 : Kurang
- 4 : Sangat Kurang
- h : Frekuensi Harapan
- X<sup>2</sup> : Chi- Kuadrat
- db : Derajat Bebas
- Σ : Jumlah

$$v = \frac{10,0603}{37 + 10,0603} = 0.6 \quad (\text{Pengaruhnya Kuat})$$

$$C_{max} = \sqrt{\frac{4 - 1}{4}} = 0,9$$

kesimpulan : Dengan melihat interval koefisien nilai C , maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan variabel pengaruhnya Kuat

**PERHITUNGAN CHI-KUADRAT VARIABEL INVESTASI PIHAK SWASTA DENGAN PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

X	X				Σ	Fh				X <sup>2</sup>				Σ
	X 1	X 2	X 3	X 4		1	2	3	4	1	2	3	4	
Y 1	9	4	1	2	16	8	4,2105	1,2632	2,5263	0,125	0,0105	0,0548	0,1096	0,3
Y 2	7	3	1	3	14	7	3,6842	1,1053	2,2105	0	0,1271	0,01	0,282	0,41905
Y 3	2	1	0	1	4	2	1,0526	0,3158	0,6316	0	0,0026	0,3158	0,2149	0,53333
Y 4	1	2	1	0	4	2	1,0526	0,3158	0,6316	0,5	0,8526	1,4825	0,6316	3,46667
Σ	19	10	3	6	38									4,71905
X <sup>2</sup>														4,71905
db														9
X <sup>2</sup> tab α = 0.05														0,711
C														0,49
C max														0,9
simpulan	Ada Pengaruh													Tolak Ho

angan :

- : Kecenderungan melakukan alih fungsi lahan sawah
- 1 : Kuat / Mau
- 2 : Sedang
- 3 : Lemah
- 4 : Tidak Mau / Sangat Lemah
- : Investasi Pihak Swasta
- 1 : Cukup
- 2 : Sedang
- 3 : Kurang
- 4 : Sangat Kurang
- : Frekuensi Harapan
- : Chi- Kuadrat
- : Derajat Bebas
- : Jumlah



$$V = \frac{4,7191}{37 + 4,7191} = 0,49 \quad (\text{Pengaruhnya Sedang})$$

$$x = v \frac{4-1}{4} = 0,9$$

mpulan : Dengan melihat interval koefisien nilai C , maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan variabel pengaruhnya Sedang.

**PERHITUNGAN CHI-KUADRAT VARIABEL INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

X	X				Σ	Fh				X <sup>2</sup>				Σ
	X1	X2	X3	X4		1	2	3	4	1	2	3	4	
Y1	4	5	1	2	12	2,9189	4,8649	1,9459	2,2703	0,4004	0,0038	0,4598	0,0322	0,89616
Y2	2	7	1	3	13	3,1622	5,2703	2,1081	2,4595	0,4271	0,5677	0,5825	0,1188	1,69609
Y3	1	1	3	1	6	1,4595	2,4324	0,973	1,1351	0,1446	0,8435	4,223	0,0161	5,22725
Y4	2	2	1	1	6	1,4595	2,4324	0,973	1,1351	0,2002	0,0769	0,0008	0,0161	0,29392
Σ	9	15	6	7	37									8,11342
X <sup>2</sup>														8,11342
db														9
X <sup>2</sup> tab α = 0.05														0,711
C														0,56
C max														0,9
kesimpulan	Ada Pengaruh													Tolak Ho

rangian :

- 1 : Kecenderungan melakukan alih fungsi lahan sawah
- 2 : Kuat / Mau
- 3 : Sedang
- 4 : Lemah
- 5 : Tidak Mau / Sangat Lemah
- 6 : Intervensi Pemerintah Daerah
- 7 : Cukup
- 8 : Sedang
- 9 : Kurang
- 10 : Sangat Kurang
- 11 : Frekuensi Harapan
- 12 : Chi- Kuadrat
- 13 : Derajat Bebas
- 14 : Jumlah

$\frac{8,1134}{37 + 8,1134} = 0,56$  (Pengaruhnya Sedang )

$\sqrt{\frac{4-1}{4}} = 0,9$

mpulan : Dengan melihat interval koefisien nilai C , maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan variabel pengaruhnya Sedang.